



BADAN POM

2023 LAPORAN TAHUNAN

**PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN**

**BADAN POM
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN**

LAPORAN TAHUNAN 2023



BADAN POM

PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2023

SAMBUTAN

Plt. KEPALA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan karunia-Nya Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM) dapat menyelesaikan kegiatan tahun 2023 dengan baik yang terangkum dalam bentuk Laporan Tahunan yang disusun setiap tahun.

Keberhasilan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lepas dari dukungan dan arahan dari Pimpinan BPOM, serta pendampingan dari tim ahli dan kontribusi yang besar dari seluruh staf Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil kegiatan Analisis Kebijakan yang dilakukan oleh Pusat Analisis kebijakan Obat dan Makanan selama tahun 2023 yang mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di lingkungan Badan POM dan masyarakat.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi pengawasan Obat dan Makanan di BPOM.

Jakarta, Maret 2024

Plt. Kepala Pusat Analisis Kebijakan
Obat dan Makanan

{ttd}

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si


DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
HIGHLIGHT KEGIATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Gambaran Umum	2
1. Visi, Misi dan Budaya Organisasi	2
2. Struktur Organisasi dan Tupoksi	4
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	7
A. Sumber Daya Manusia	7
1. Data Kepegawaian	7
2. Kebutuhan Pegawai	10
3. Peningkatan Kompetensi SDM	11
4. Sarana dan Prasarana	11
B. Anggaran	13
1. Realisasi Anggaran (Rincian per kegiatan(subkomponen))	13
BAB III HASIL KEGIATAN	19
SK 1 : Tersedianya Analisis Dan Rekomendasi Kebijakan Dibidang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Berkualitas	19
IKSK 1.1 Persentase Analisis Dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Dimanfaatkan	19
IKSK 1.2 Indeks Kepuasan Internal Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	38
SK 2 : Tersedianya perencanaan analisis kebijakan sesuai kebutuhan	39
IKSK 2 : Persentase Analisis Kebijakan Yang Sesuai Dengan Perencanaan	39
SK 3 : Terlaksananya Penyelenggaraan Analisis Kebijakan Yang Sesuai Pedoman Analisis Kebijakan	40
IKSK 3 : Persentase Kesesuaian Analisis Kebijakan Dengan Pedoman Analisis Kebijakan	40
SK 4 : Terdiseminasinya Hasil Analisis Kebijakan yang Optimal	42
IKSK 4 : Nilai Kualitas Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan	42

SK 5 : Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	46
IKSK 5 : Tingkat Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	46
SK 6 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan yang Optimal	54
IKSK 6.1 : Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	54
IKSK 6.2 : Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.....	55
SK 7 : Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal.....	57
IKSK 7 : Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.....	57
SK 8 : Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	63
IKSK 8 : Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal.....	63
SK 9 : Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	65
IKSK 9 : Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	65
SK 10 : Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Di Unit Pusat Analisis dan Kajian Obat Dan Makanan.....	66
IKSK 10 : Nilai Pengelolaan Kearsipan di Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan.....	66
SK 11 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan	67
IKSK 11 : Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa di Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan.....	67
SK 12 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pengadaan BMN di unit Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan.....	68
IKSK 12 : Nilai Pengelolaan BMN di Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan.....	68
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Visi dan Misi	2
Gambar 1. 2 Budaya Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	3
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.....	5
Gambar 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	7
Gambar 2. 2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Gambar 2. 3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	8
Gambar 2. 4 Data Pegawai Berdasarkan Usia.....	8
Gambar 2. 5 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat	9
Gambar 2. 6 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan.....	9
Gambar 3. 1 Focus Grooup Discussion Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	22
Gambar 3. 2 Pelaksanaan wawancara dalam rangka Pengukuran Indeks dan Kepuasan Masyarakat di Sumba Barat Daya.....	25
Gambar 3. 3 Focus Group Discussion Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan yang Memenuhi Syarat	29
Gambar 3. 4 Workshop Series Terkait Penyusunan Kebijakan Pro HAM dan Demokrasi	38
Gambar 3. 5 Focus Group Discussion Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022	43
Gambar 3. 6 Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022 di Bali.....	44
Gambar 3. 7 Peserta Undangan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022 di Bali	45
Gambar 3. 8. Kegiatan KIE bersama dengan Anggota Komisi IX DPR RI	46
Gambar 3. 9 Workshop Dukungan Strategis Pimpinan.....	47
Gambar 3. 10 Sebaran Keterkaitan Topik Kegiatan 2023 dan Satker BPOM Pusat	47
Gambar 3. 11 Workshop Penyusunan Pedoman Bahan Substansi Kegiatan Pimpinan BPOM	48
Gambar 3. 12 Workshop Peningkatan Manfaat Bahan Substansi Strategis Pimpinan	49
Gambar 3. 13 Focus Group Discussion (FGD) 18 Juli 2023.....	50



Gambar 3. 14 Workshop Penyusunan Buku Bunga Rampai di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	50
Gambar 3. 15 Workshop Evaluasi Pemantauan Kebijakan Strategis Pimpinan	51
Gambar 3. 16 Desk Pemantauan Implementasi Kebijakan Strategis Pimpinan Triwulan I Tahun 2023	53
Gambar 3. 17 Indeks Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan Tahun 2021-2023	54
Gambar 3. 18 Sharing Session dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun	56
Gambar 3. 19 Peserta Evaluasi Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	57
Gambar 3. 20 Seminar ChatGPT sebagai salah satu peningkatan kompetensi JFAK	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Kebutuhan Pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023	10
Tabel 2. 2 Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2023	11
Tabel 2. 3 Realisasi Anggaran Tahun 2023	13
Tabel 3. 1 Daftar Pengadaan Fasilitas Perkantoran Tahun 2023.....	39
Tabel 3. 2 Pencaiaapaian jam pelajaran (JP) Tahun 2023	58
Tabel 3. 3 Persebaran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Berdasarkan Unit Kerja	61
Tabel 3. 4 Sebaran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan berdasarkan Jenjang ...	62
Tabel 3. 5 Daftar Pengadaan Alat Pengolahan Data Tahun 2023	63
Tabel 3. 6 Tingkat Kepatuhan Dalam Pemanfaatan Sistem Pengadaan (IPS)	68
Tabel 3. 7 Daftar PSP BMN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023	69
Tabel 3. 8 Daftar Penghapusan BMN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Tabel daftar Pengembangan Kompetensi Tahun 2023.....	76
Lampiran 2. Rencana Pengembangan Kompetensi tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	96
Lampiran 3. Tabel Publikasi Hasil Kajian Riset Obat dan Makanan Tahun 2023..	98

HIGHLIGHT KEGIATAN

FEBRUARI



Forum Diskusi dan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Pengukuran Indeks Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 pada tanggal 20 Februari 2023 di Hotel The Margo, Depok.

Workshop Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dengan mengangkat tema “Analisis Kebijakan BPOM: Cerdas, Profesional, dan Tangguh”. Workshop yang dilaksanakan pada 3 Maret 2023 di Hotel Aston Jakarta ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan di BPOM.

MARET



JUNI



Webinar Obat dan Makanan Ramah Lingkungan dengan mengusung tema **“Bersama Mendukung Produksi dan Konsumsi Obat dan Makanan yang Berkelanjutan”** dilakukan secara *hybrid* pada tanggal 26 Juni 2023 di The Margo Hotel, Depok. Kegiatan dibuka oleh

Sekretaris Utama BPOM, Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si yang dihadiri oleh para narasumber, perwakilan unit pusat dan UPT seluruh Indonesia, serta Kementerian/ Lembaga dan Asosiasi terkait.



JULI



Forum Konsultasi (FORKON) Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada 28 Juli 2023 di Hotel *Holiday Inn*, Bandung. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris

Utama BPOM, Ibu Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si. dan dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pusat dan UPT di seluruh Indonesia.



AGUSTUS



Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia secara daring.

Workshop Penulisan Karya Tulis Ilmiah Populer pada Rabu, 16 Agustus 2023 di Hotel Avenzel, Cibubur. *Workshop* dihadiri oleh 51 peserta secara luring dari perwakilan Unit Kerja di BPOM Pusat dan BBPOM di Jakarta serta peserta perwakilan Balai

OKTOBER



Workshop series “Peningkatan Pemahaman Mengenai Kebijakan Pro Bisnis dan HAM (BHAM) dalam Pengawasan Obat dan Makanan seri I pada tanggal 16 Oktober 2023, bertempat di Hotel Grand Mansion, Menteng. Workshop seri I ini dihadiri oleh 125 peserta offline dan online.

Selanjutnya pelaksanaan seri II pada tanggal 23 Oktober 2023 di Hotel Grand Mercure Jakarta, Harmoni.

NOVEMBER



Terhadap Rekomendasi Batas Maksimal Pb oleh Codex.

7 November 2023, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik **Kajian Cemaran Timbal (Pb) dan Studi Kelayakan industri Gula, Garam dan Makanan Pendamping-ASI (MP-ASI)**

Pada Selasa, 5 Desember 2023, dilaksanakan pembahasan hasil Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok *Reserve* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Kefarmasian.



7 Desember 2023, dilaksanakan seminar “Mengetahui ChatGPT sebagai *AI-Powered Tool* dan Pemanfaatannya dalam Pengelolaan Informasi” Kegiatan ini menghadirkan pakar di bidang kebijakan publik dan digitalisasi, Dr. Marcelino R Pandin dari PT Telkom Indonesia.



BAB I

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

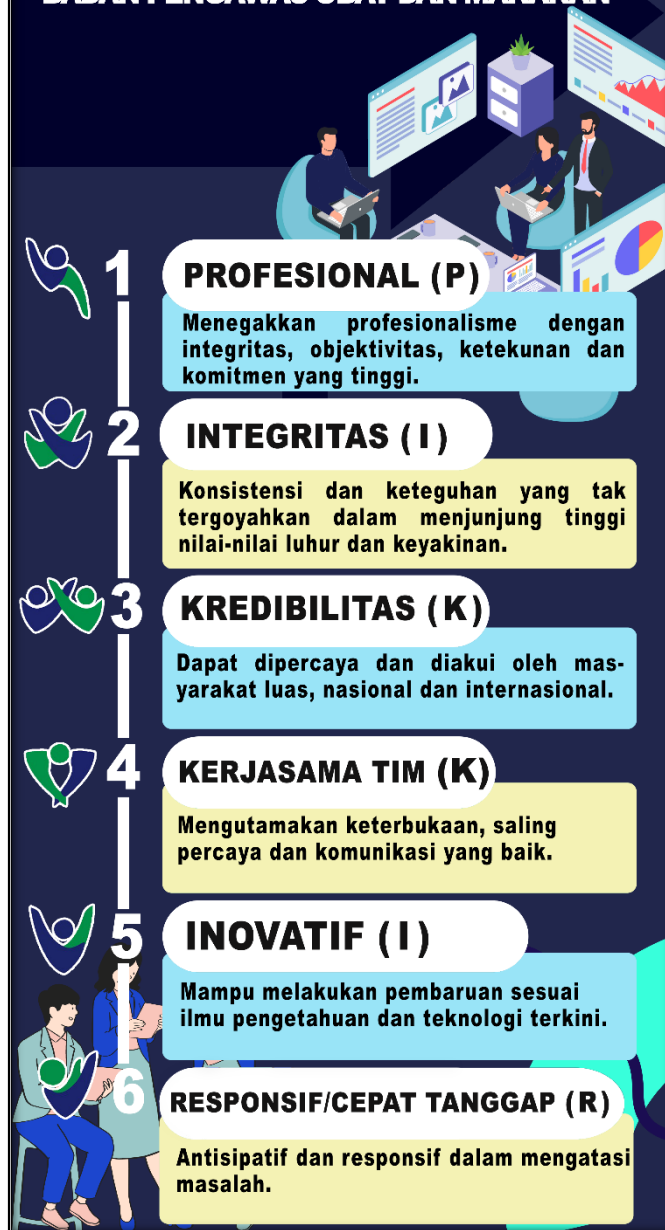
1. Visi, Misi dan Budaya Organisasi



Gambar 1. 1 Visi dan Misi

Budaya organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah budaya PIKKIR seperti pada Gambar 1.2.

BUDAYA ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1. 2 Budaya Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tujuan organisasi yang merupakan penjabaran dari misi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya unit Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan prima untuk mendukung kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
2. Terwujudnya kemanfaatan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang optimal

2. Struktur Organisasi dan Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan merupakan unsur pendukung Pengawasan Obat dan Makanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki tugas “melaksanakan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain ketujuh fungsi diatas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah salah satu unit kerja di lingkungan BPOM yang berperan dalam menyediakan data sebagai scientific evidence yang mendukung pengambilan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan analisis kebijakan.

Secara garis besar fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mendukung 4 (empat) pilar lembaga BPOM dalam beberapa hal, yakni:

1. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan perkuatan regulasi, konfirmasi produk teregistrasi yang beredar, kajian implementasi kebijakan dan penyediaan data dasar yang dapat menjadi acuan dalam pengajuan saran kebijakan ataupun reviu kebijakan;

2. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) antara lain: pelaksanaan survei dan kajian, penyediaan data evaluasi metode sampling, penerapan pedoman sampling sesuai ketentuan, kajian risiko keamanan serta penyediaan *baseline* data peredaran produk;
3. Mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui penyediaan *baseline* data terkait masyarakat dan pelaku usaha;
4. Mendukung penegakan hukum melalui penyediaan informasi adanya ketidaksesuaian produk dan melalui kajian risiko.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut: Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan membawahi Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan



BAB II

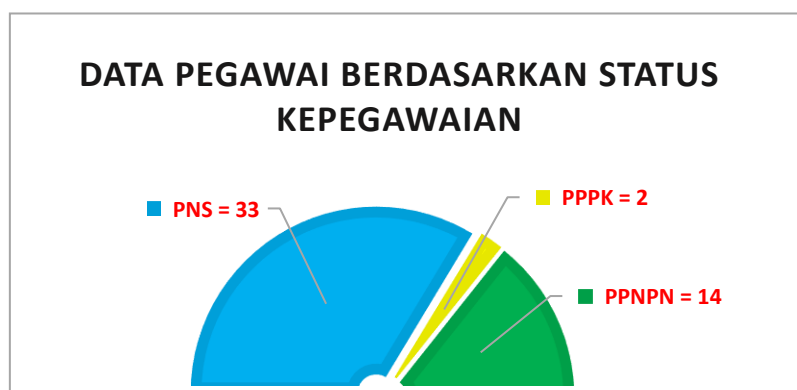
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

1. Data Kepegawaian

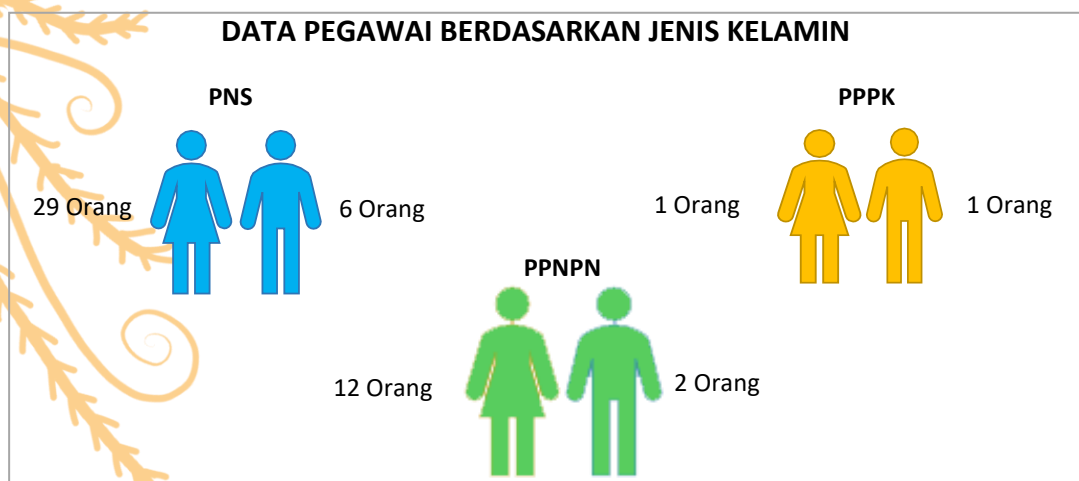
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sumber daya manusia Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terdiri 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengingat beban pekerjaan yang semakin tinggi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dibantu oleh 14 orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

a. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



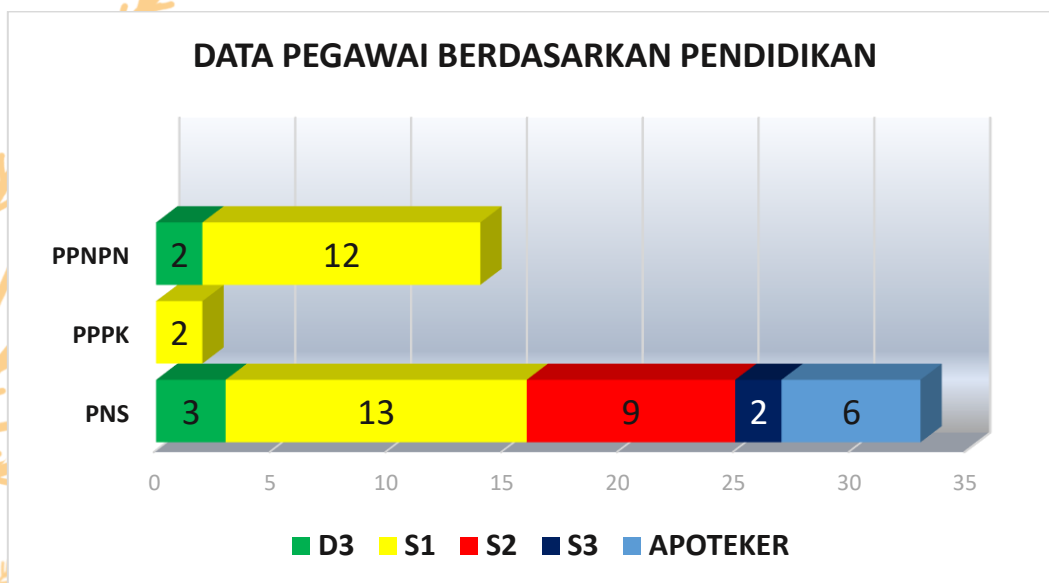
Gambar 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

b. Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



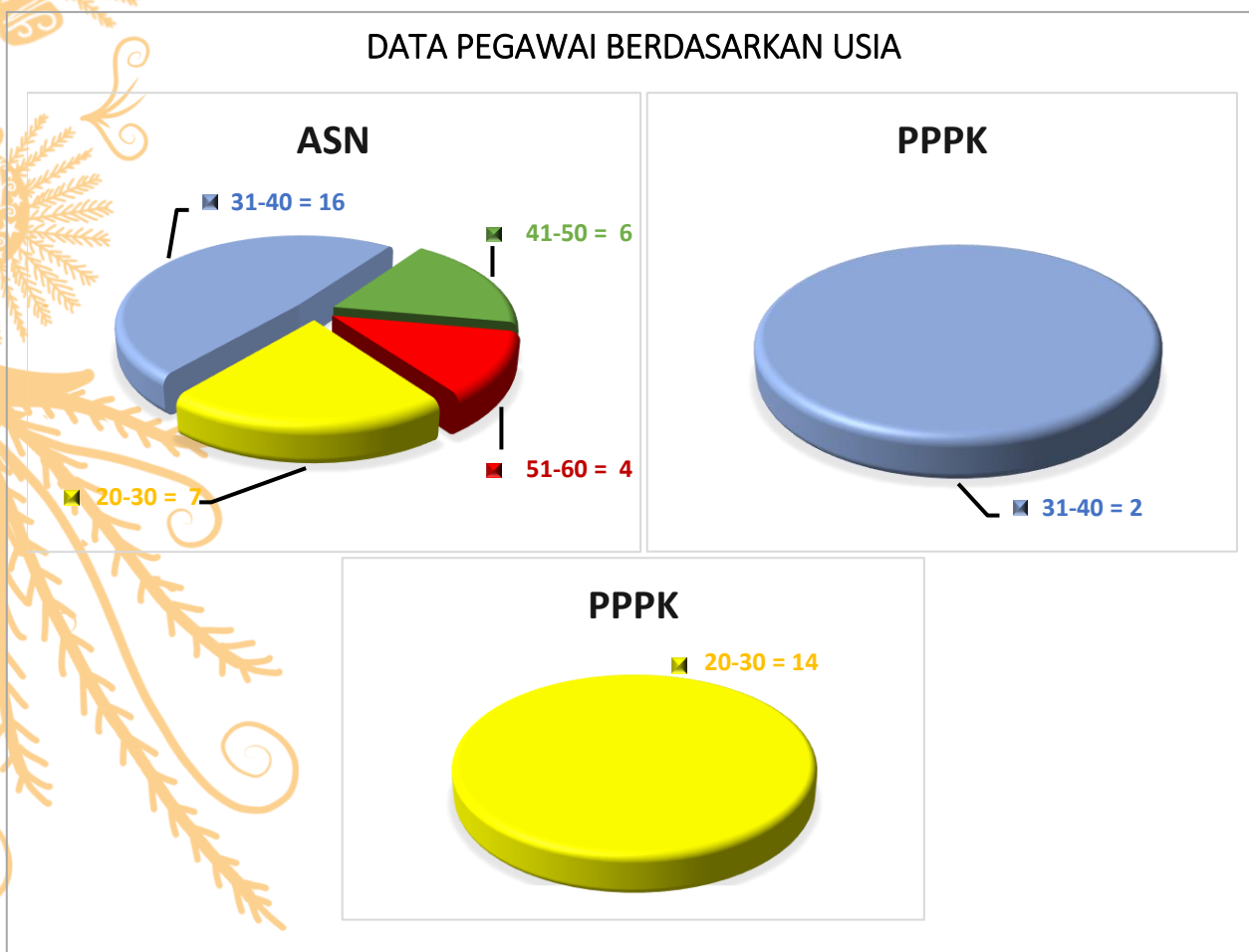
Gambar 2. 2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

c. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan



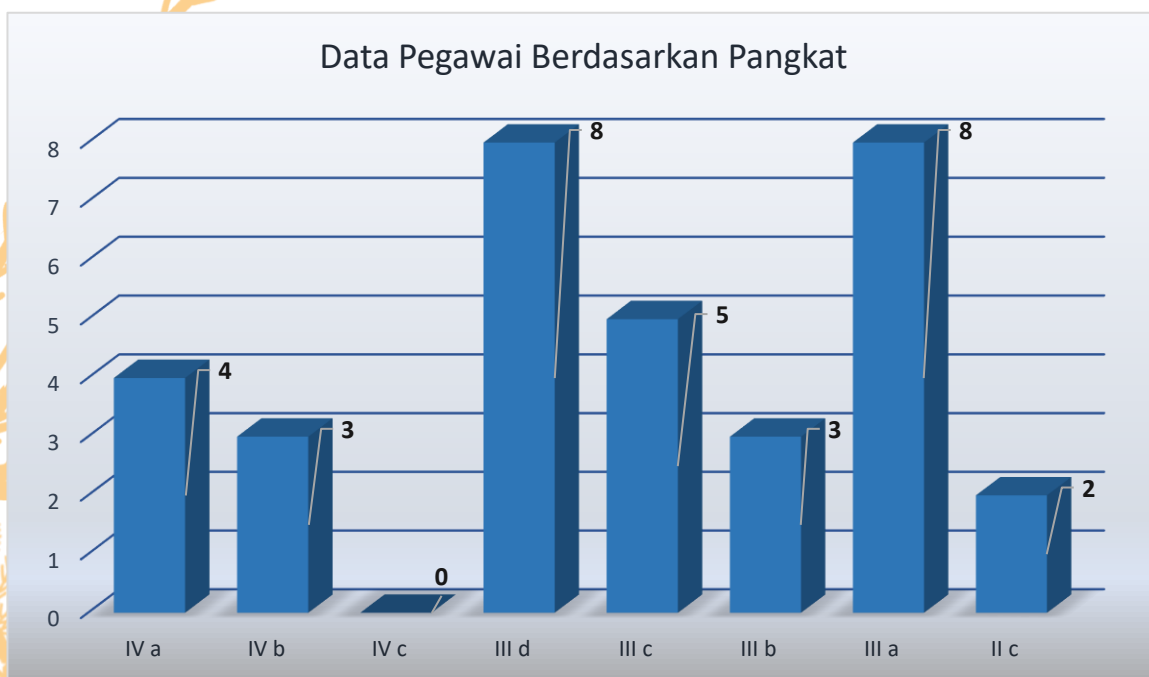
Gambar 2. 3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

d. Data Pegawai berdasarkan Usia



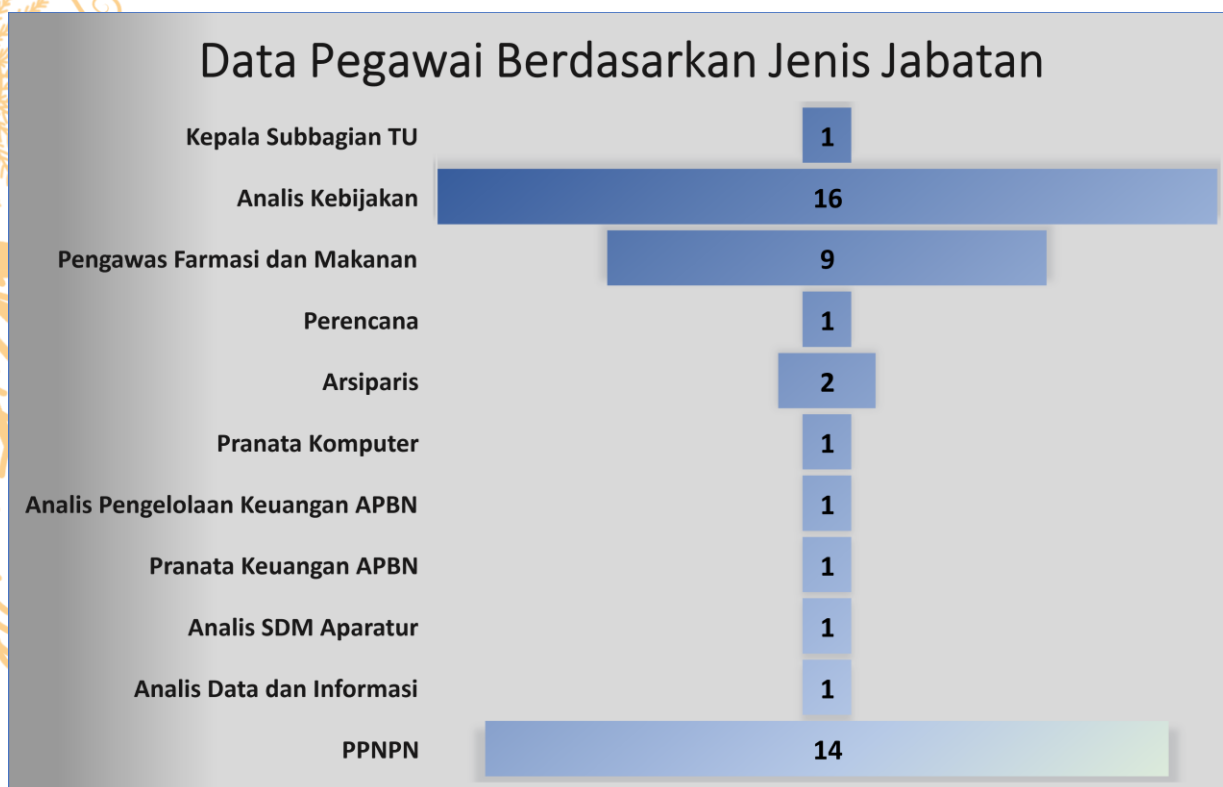
Gambar 2. 4 Data Pegawai Berdasarkan Usia

e. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat



Gambar 2. 5 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat

f. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan



Gambar 2. 6 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

2. Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2023 di lingkungan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terdapat kekurangan pada segi kuantitas jumlah pegawai. Dari analisis Beban Kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa formasi ideal yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kebutuhan Pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023

Jabatan	Existing	ABK	Kekurangan
Kepala PusAKOM	1	1	0
Kepala Subbagian Tata Usaha pada PusAKOM	1	1	1
Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	9	2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	7	14	7
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	7	16	9
PFM Ahli Madya	2	0	2
PFM Ahli MUDA	6	0	6
PFM Ahli Pertama	2	0	2
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	1	1
Perencana Ahli Madya	0	1	1
Perencana Ahli Muda	0	1	1
Perencana Ahli Pertama	1	2	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	1
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	0	1
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	0	1	1
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	1	1
Analisis Data dan Informasi	1	0	1
Arsiparis Ahli Pertama	1	1	1
Arsiparis Mahir	0	1	1
Arsiparis Terampil	1	2	1

Jabatan	Existing	ABK	Kekurangan
Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	1
Pranata Komputer Mahir	0	1	1
Pranata Komputer Terampil	1	1	1
Penata Laksana Barang Terampil	0	2	2
Pranata SDM Aparatur Mahir	0	1	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	1
Statistisi Ahli Muda	0	1	1
Statistisi Ahli Pertama	0	1	1

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memastikan kemampuan pegawai agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dapat terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia kepada seluruh pegawai untuk mendukung kualifikasi masing-masing pegawai, sehingga dapat terwujud visi dan misi instansi. Rincian tabel kegiatan pengembangan kompetensi dapat dilihat pada Lampiran 1 dan rencana pengembangan kompetensi tahun 2023-2025 dapat dilihat pada Lampiran 2.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal sangat penting dalam menunjang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, oleh karena itu pada tahun 2023 dilakukan pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan pada tahun 2023. Adapun daftar sarana dan prasarana tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2023

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	1	Baik
2	Kendaraan Roda 2	1	Baik

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
3	Mesin Fotocopy	1	Baik
4	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
5	Lemari	5	Baik
6	Meja	3	Baik
7	Kursi	6	Baik
8	Bracket Standing Peralatan untuk TV	2	Baik
9	Brankas	1	Baik
10	Copy Board/Elektric White Board	1	Baik
11	Laser Pointer	2	Baik
12	Lemari Es	2	Baik
13	Camera Digital	2	Baik
14	Camera Conference	2	Baik
15	Copy Board/Elektric White Board	1	Baik
16	Dispenser	5	Baik
17	Screen Proyektor	1	Baik
18	Handy Cam	1	Baik
19	LCD Projector/Infocus	4	Baik
20	Microphone	4	Baik
21	Oven Listrik	1	Baik
22	Stabilizer Camera	1	Baik
23	Pesawat Telephone	1	Baik
24	Televisi	3	Baik
25	Tripod Camera	3	Baik
26	Unit Tape Recorder	1	Baik
27	Voice Recorder	8	Baik
28	PC	27	Baik
29	Laptop	71	Baik
30	External/ Portable Hardisk	17	Baik

B. Anggaran

1. Realisasi Anggaran (Rincian per kegiatan(subkomponen))

Pada tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan didukung dengan anggaran yang bersumber dari rupiah murni APBN melalui DIPA Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Nomor SP DIPA-063.01.1.632441/2023 dengan nilai pagu awal tahun 2023 sebesar Rp. 23.934.915.000,- dengan komposisi Rp. 7.883.520.000 belanja operasional dan Rp. 16.051.395.000,- belanja non operasional. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2023, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mendapatkan re-alokasi anggaran dari Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp. 228.262000,- Sehingga anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan naik menjadi Rp. 24.163.177.000,- Anggaran yang dialokasikan Pusat Analisis Kebijakan obat dan Makanan ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan pengawasan obat dan makanan, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta pelaksanaan operasional perkantoran.

Tabel 2. 3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	OUTPUT/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	PERSEN (%)
DR.4135.CAB.001 Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	25.990.000	25.300.000	97,35 %
DR.4135.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi				
A	Pengadaan Alat Pengolah Data	286.824.000	286.804.000	99,99 %
DR.4135.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan				
051. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
A	Analisis Kebijakan BPOM dalam Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran di Bidang Obat	293.000.000	292.663.788	99,89 %

No	OUTPUT/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	PERSEN (%)
B	Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan	105.142.000	105.080.700	99,94 %
C	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	781.902.000	781.598.536	99,96 %
D	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023	3.734.672.000	3.734.509.325	100,00 %
E	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan BPOM Tahun 2023	80.585.000	80.585.000	100,00 %
F	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	336.924.000	336.820.675	99,97 %
G	Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat	591.153.000	590.934.800	99,96 %
H	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	173.286.000	173.215.000	99,96 %

No	OUTPUT/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	PERSEN (%)
I	Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Kefarmasian	680.761.000	680.660.907	99,99 %
J	Evaluasi Efektivitas Program Penataan dan Penguatan UPT BPOM	630.675.000	630.580.358	99,98 %
K	Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2023	1.381.438.000	1.381.350.217	99,99 %
L	Publikasi Hasil Analisis Kebijakan	301.000	300.009	99,67 %
M	Sosialisasi Obat dan Makanan yang Baik dan Aman Tahun 2023	3.157.385.000	3.157.250.000	100,00 %
N	Peningkatan Pendukung Analisis Kebijakan	406.234.000	404.544.448	99,58 %
O	Penataan Organisasi dan Tatalaksana	179.609.000	179.592.180	99,99 %
P	Pengembangan Kapasitas dan Karier Talenta	270.012.000	268.465.200	99,43 %
Q	Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan	540.634.000	540.324.029	99,94 %
R	Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan	162.134.000	162.128.807	100,00 %
S	Analisis Kebijakan Strategis	159.154.000	159.124.600	99,98 %
T	Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan	423.736.000	423.567.885	99,96 %
U	Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan	182.557.000	182.515.500	99,98 %
052. Peningkatan Kinerja Berkelanjutan				

No	OUTPUT/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	PERSEN (%)
A	Seminar/ Workshop/Training/Mengikuti kegiatan BPOM di Dalam Negeri	132.043.000	131.698.157	99,74 %
B	Pelatihan Teknis/Manajemen (In House Training)	35.840.000	35.832.700	99,98 %
C	Penerapan Sistem Mutu	366.546.000	366.460.680	99,98 %
D	Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga	217.680.000	217.421.602	99,88 %
E	Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	292.440.000	283.360.700	96,90 %
F	Penguatan Organisasi Pusat Analisis Kebijakan	329.946.000	329.939.696	100,00 %
G	Evaluasi Kinerja Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	377.456.000	377.407.575	99,99 %
H	Pengembangan Subsite Sistem Informasi Riset	78.255.000	78.255.000	100,00 %
I	Workshop Series Terkait Penyusunan Kebijakan Pro HAM dan Demokrasi Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan	96.221.000	96.184.500	99,96 %
WA.6384.EBA.994 Layanan Perkantoran				
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	5.492.472.000	5.381.656.315	97,98 %
A	Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	66.641.000	66.560.540	99,88 %
B	Pengadaan Perlengkapan Kantor	352.568.000	343.299.737	97,37 %
C	Perawatan Kendaraan Kantor	69.800.000	69.164.378	99,09 %
D	Langganan Daya dan Jasa	4.800.000	4.261.000	88,77 %
E	Operasional Perkantoran	1.555.487.000	1.544.972.000	99,32 %



No	OUTPUT/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp)	PERSEN (%)
F	Pemeriksaan Kesehatan	90.984.000	90.980.500	100,00 %
G	Koordinasi Internal dan Eksternal	19.890.000	19.744.280	99,27 %
TOTAL		24.,163.177.0 00	24,015,115,324	99,39 %



BAB III

SK 1 : Tersedianya Analisis Dan Rekomendasi Kebijakan Dibidang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Berkualitas

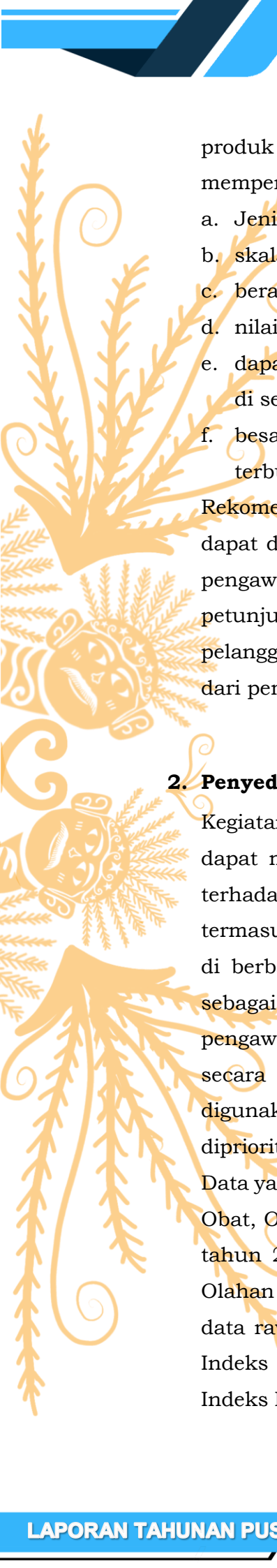
IKSK 1.1 Persentase Analisis Dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Dimanfaatkan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung ketercapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Analisis Kebijakan BPOM dalam Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran di Bidang Obat

Analisis kebijakan ini disusun untuk melakukan studi terkait pemberlakuan denda administratif terhadap pelanggaran di bidang Obat. Hal ini dikarenakan saat ini pemberlakuan sanksi administratif tanpa denda administratif yang terjadi saat ini masih tetap menimbulkan pelanggaran berulang. Tujuan utama dari pelaksanaan analisis kebijakan ini adalah menganalisis parameter dalam pemberian sanksi denda administratif terhadap pelanggaran di bidang obat dan menyusun rekomendasi terhadap kebijakan pemberian sanksi denda administratif bagi pelanggaran di bidang obat. Analisis kebijakan ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif (mix method study) melalui *focus group discussion* serta menggunakan data sekunder dari data internal, kajian literatur dan data desk analysis dari regulasi yang sudah ada.

Hasil yang diperoleh dari analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa sanksi administratif sebetulnya lebih efektif ketimbang sanksi pidana karena sanksi administratif dapat dilakukan langsung oleh pejabat administrasi tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu. Pengenaan denda administratif diperlukan adanya denda dasar sebagai kecenderungan aturan yang bersifat retributif, dengan sifat retributif maka denda diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga tujuan dari sifat retributif ini adalah pemberian hukuman. Berdasarkan analisis biaya dan manfaat diperoleh hasil bahwa biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam pengawasan di bidang obat tidak sebanding dengan manfaat moneter yang didapat dari



produk obat teregistrasi. Untuk besaran penetapan denda dapat mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

- a. Jenis pelanggaran
- b. skala usaha
- c. beratnya dampak pelanggaran
- d. nilai keekonomian
- e. dapat diterapkan di semua bisnis peredaran produk secara proporsional, di semua area pengawasan dan wilayah
- f. besarnya denda ditetapkan sesuai mekanisme/proses yang sama dan terbuka, sesuai standar secara fair

Rekomendasi dari hasil analisis adalah pemberian sanksi denda administratif dapat diusulkan sebagai kebijakan baru sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan di bidang obat, dengan catatan diperlukan penetapan pedoman petunjuk teknis penerapannya yang berkeadilan dan menyesuaikan kondisi pelanggaran yang variatif dapat dilakukan pendekatan yang berbeda-beda dari perspektif implementasi.

2. Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan ini dilakukan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk dapat menyediakan data yang menggambarkan profil yang sesungguhnya terhadap produk yang beredar dan bagaimana konsumsinya di masyarakat, termasuk peta masalah tentang keamanan, mutu dan kemanfaatan/khasiat di berbagai daerah/wilayah. Data ini selanjutnya akan digunakan BPOM sebagai baseline atau dasar dalam mengukur seberapa luas jangkauan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan bagaimana tren kinerjanya, baik secara nasional maupun secara provinsi. Ketersediaan data ini juga digunakan untuk melihat gambaran produk Obat dan Makanan yang diprioritaskan atau dianggap dapat berisiko menjadi masalah.

Data yang digunakan dalam proses analisis kebijakan meliputi data registrasi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan tahun 2018 2022, data survei profil Obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan beredar 2018, 2019 dan 2022, data pengawasan SIPT 2018 2022, data rawan kasus kejahatan 2018 2022, Data SUSENAS (BPS) 2020, Data Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan 2022, Data Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan 2022, Data pengawasan

produksi dan distribusi (e-was) 2018-2022, dan Data importasi obat 2018-2022. Analisis statistik yang digunakan untuk evaluasi profil pengawasan Obat dan Makanan ini adalah statistik deskriptif dan korelasi pearson.

Hasil analisis menunjukkan gap persentase NIE produk yang ditemukan beredar dibandingkan terhadap NIE yang terdaftar/ teregistrasi di BPOM untuk komoditas Obat. Ada 37 Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 50% sedangkan kosmetik dan pangan olahan gap antara produk yang ditemukan beredar dengan produk yang terdaftar sangat besar, yaitu lebih dari 80%. Untuk pelaksanaan survei selanjutnya, agar dapat memperoleh gambaran peredaran kosmetik dan pangan olahan yang lebih luas perlu melakukan mapping rantai distribusi . Selain itu perlu juga untuk melakukan analisis pasar untuk memahami tren konsumen, permintaan pasar dan faktor eksternal yang mempengaruhi distribusi produk kosmetik dan pangan olahan mengingat tren pasar untuk komoditas ini dinamis.

3. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)

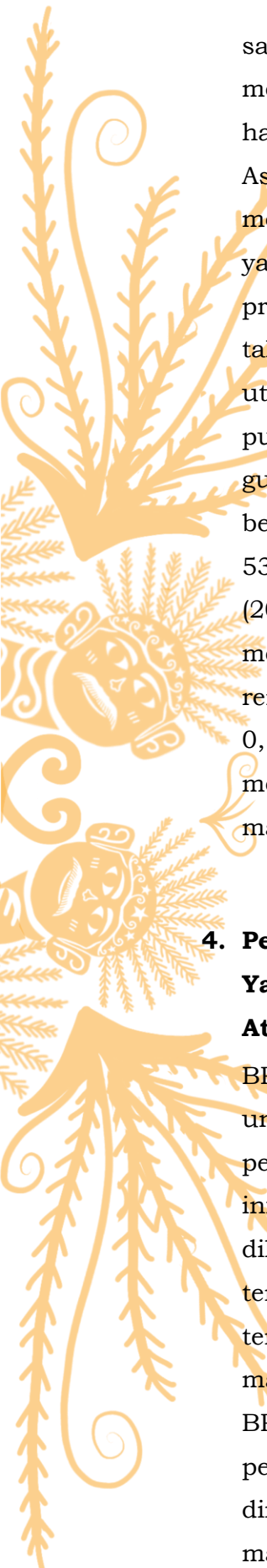
Kegiatan ini berdasarkan permintaan dari Manajer Risiko Badan POM, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan) sebagai Sekretariat Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) melakukan kajian cemaran Pb pada produk gula kristal putih dan gula kristal rafinasi, garam beryodium dan MP-ASI serta menganalisis kesiapan pelaku usaha bila batas maksimal cemaran yang lebih ketat tersebut diterapkan di Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan tujuan (1) menyediakan profil kadar timbal (Pb) pada produk gula kristal putih (GKP) dan gula kristal rafinasi (GKR), garam beryodium dan MP-ASI, (2) meningkatkan daya saing produsen keempat komoditi tersebut di Indonesia, (3) menyediakan data nasional untuk posisi Indonesia saat sidang Codex Committee on Contaminant in Foods (CCCCF), dan (4) memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh Badan POM dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan kajian melibatkan para pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Nasional, P3GI, Asosiasi Pelaku Usaha Gula, Garam dan MPASI, Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia, serta Perguruan Tinggi. Tahapan kajian

meliputi persiapan (mapping kemampuan uji laboratorium, mapping populasi pelaku usaha gula, garam dan MP-ASI, inventarisasi dan cleaning data hasil pengawasan BPOM tahun 2018-2022, penyusunan kerangka sampling, dan penyusunan pedoman sampling), studi lapangan, sampling, pengujian, pengolahan dan analisis data, dan pembahasan hasil kajian.



Gambar 3. 1 Focus Group Discussion Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)

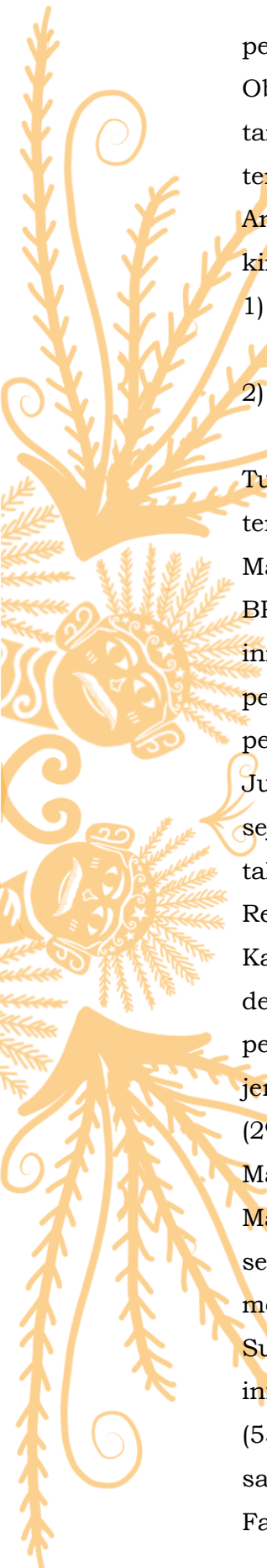
Hasil studi kelayakan menunjukkan rerata kadar Pb pada 36 sampel produk GKP dan GKR hasil sampling Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (2023) dapat memenuhi batas maksimal yang ditetapkan Codex (0,1 mg/kg), yaitu untuk GKP $0,0476 \pm 0,0638$ mg/kg (Pb), $0,0894 \pm 0,2578$ % (kadar air) dan $0,1121 \pm 0,3565$ % (kadar abu). Sedangkan untuk produk GKR diperoleh rerata $0,0213 \pm 0,0137$ mg/kg (Pb), $0,0341 \pm 0,0101$ % (kadar air) dan $0,0452 \pm 0,0361$ mg/kg (kadar abu). Rerata kadar Pb dari 873 data hasil pengawasan BPOM dua kali lebih rendah yaitu $0,0216 \pm 0,0139$ mg/kg untuk GKP dan $0,0048 \pm 0,0055$ mg/kg untuk GKR. Kadar Pb pada GKR umumnya lebih rendah dibanding GKP karena bahan baku yang digunakan oleh pabrik GKP adalah tebu sedangkan pabrik GKR menggunakan gula kristal mentah. Selain itu produk GKR mengalami tahapan pemurnian yang lebih kompleks, namun GKR hanya diperbolehkan dijual secara bussiness to bussiness, tidak untuk retail dalam rangka mendukung produk GKP. Semua sampel garam beryodium (Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, 2023) sebanyak 44 sampel telah mampu memenuhi batas maksimal Pb yang ditetapkan Codex (1,0 mg/kg), dengan rerata $0,0786 \pm 0,0628$ mg/kg. Namun dengan jumlah



sampel yang jauh lebih banyak, yaitu 2401 sampel diperoleh distribusi yang mendekati aslinya yaitu dengan rerata kadar Pb $0,4555 \pm 0,8393$ mg/kg dan hanya 83,09% yang memenuhi Codex. Sehingga bila mengacu pada prinsip As Low As Reasonably Achievable (ALARA) maka Badan POM dapat menetapkan batas maksimal Pb pada garam beryodium pada persentil 95, yaitu 3,5 mg/kg. Pada produk MP-ASI terdapat kekhasan karena kadar Pb di produk akhir sangat dipengaruhi kadar Pb di bahan baku karena tidak ada tahapan dalam produksi yang dapat mengurangi kadar Pb. Bahan baku utama MP-ASI umumnya adalah serealisa seperti kacang-kacangan, beras putih, beras merah dan dalam bentuk tepung. Selain itu juga menggunakan gula dan garam serta sayuran beku. Saat ini batas maksimal kadar Pb pada beras maupun serealisa adalah 0,20 mg/kg (Peraturan Menteri Pertanian No. 53 Tahun 2018). Hasil sampling Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (2023) sebanyak 36 produk MP-ASI menunjukkan tidak ada yang dapat memenuhi batas maksimal Pb yang ditetapkan Codex (0,02 mg/kg), dengan rerata $0,0553 \pm 0,0223$ mg/kg, nilai minimal 0,0221 mg/kg dan maksimal 0,1250 mg/kg. Sebaliknya hasil pre market Badan POM tahun 2018-2022 menunjukkan 100% mampu memenuhi batas maksimal Codex dan hasil post market hanya 87,22%.

4. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023

BPOM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat dapat diukur salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja



pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan program dan capaian target kinerja BPOM, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut secara sistematis dan scientific based. Untuk itu tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melakukan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) BPOM level 0 pada sasaran strategis 2 dan 3 yaitu:

- 1) Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, dan
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Tujuan pengukuran adalah menyediakan data indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di level Nasional, Komoditi dan Provinsi. Disamping itu, pengukuran ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan/peningkatan program pemberdayaan masyarakat serta pengawasan Obat dan Makanan.

Jumlah capaian responden sebanyak 18.201 yang merepresentasikan sejumlah 186.131.872 penduduk dewasa Indonesia yang berusia 17 - 65 tahun (Proyeksi Penduduk 2023 - BPS) dengan response rate 99,90%. Responden terpilih mewakili 58,80% wilayah urban dan 41,20% rural. Karakteristik responden terdiri dari 50,53% laki-laki dan 49,47% perempuan dengan mayoritas berada pada rentang usia 36-50 tahun (33,97%). Tingkat pendidikan responden terbanyak yaitu SLTA/ sederajat (43,66%). Sedangkan jenis pekerjaan responden 3 (tiga) terbanyak adalah Ibu Rumah Tangga (29,66%), Pegawai/Karyawan (21,90%), dan Wiraswasta (19,03%). Masyarakat yang mengetahui BPOM sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan sebesar 71,13%, nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 67,91%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengetahui program-program pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. Sumber perolehan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui BPOM dan informasi keamanan produk paling banyak diperoleh melalui televisi (55,47%), kemasan produk (45,67%), rekomendasi teman/kerabat/saudara/keluarga (21,77%) dan media sosial (Whatsapp, Instagram, Facebook, You Tube, Tik Tok, Twitter, Telegram, dll) sebesar 19,48%.



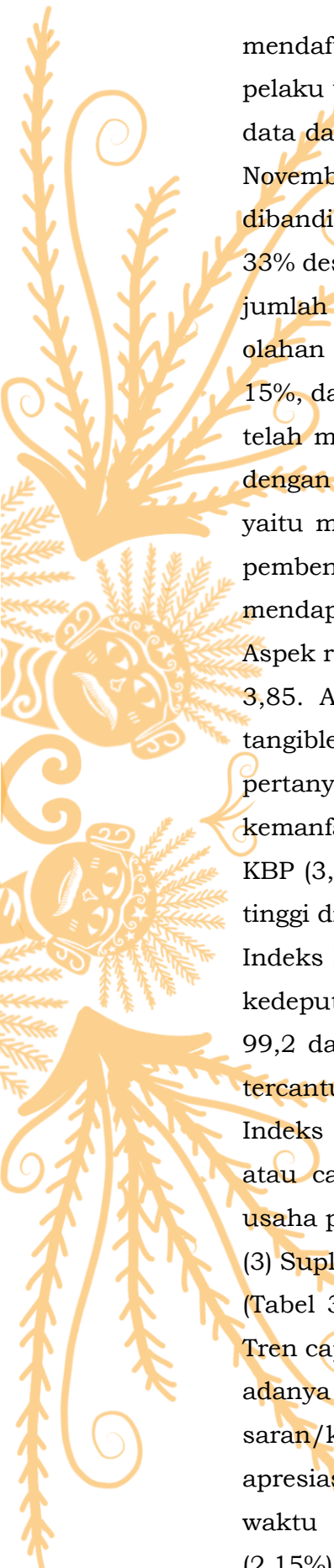
Gambar 3. 2 Pelaksanaan wawancara dalam rangka Pengukuran Indeks dan Kepuasan Masyarakat di Sumba Barat Daya

5. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan BPOM Tahun 2022

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level 0, sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan. Cascading IKU ini terdapat pada level I (Kedeputian I, II, dan III) dan level II (Balai Besar/Balai POM). Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Tujuan pengukuran ini adalah untuk memperoleh Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 serta mengevaluasi kegiatan bimbingan dan pembinaan BPOM terhadap pelaku usaha.

Pada tahun 2023, jumlah unit kerja yang melakukan Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) bagi pelaku usaha sebanyak 49 unit kerja terdiri dari 15 unit kerja Pusat dan 34 Balai Besar/Balai POM. Setiap unit kerja



mendaftarkan KBP pada aplikasi survei dan memberikan link survei kepada pelaku usaha. Sebanyak 836 KBP telah dilakukan dan berhasil memperoleh data dari 21.379 responden selama periode survei dari 2 Januari hingga 30 November 2023. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebanyak 267 kegiatan dibanding tahun 2022. Proporsi jumlah KBP untuk setiap jenis kegiatan yaitu 33% desk, 26% bimtek, 21% sosialisasi, dan 20% pendampingan. Jika dilihat jumlah responden setiap komoditi, persentase responden komoditi pangan olahan sebanyak 50%, obat sebanyak 12%, kosmetik 15%, obat tradisional 15%, dan suplemen kesehatan 8%. Data ini menginformasikan bahwa BPOM telah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan dan profil jumlah pelaku usaha yang ada di lapangan yaitu mayoritas pelaku usaha pangan olahan. Berdasarkan analisis aspek pembentuk kepuasan diperoleh informasi bahwa aspek empathy mendapatkan nilai rata-rata tertinggi dibanding aspek yang lain yaitu 3,89. Aspek reliability dan responsiveness memiliki nilai rata-rata yang sama yaitu 3,85. Aspek assurance memiliki nilai rata-rata sebesar 3,83, dan aspek tangible sebesar 3,81. Sedangkan jika dilihat dari nilai rata-rata setiap pertanyaan, maka pertanyaan yang memiliki nilai tertinggi adalah kemanfaatan materi KBP (3,90) dan yang terendah adalah kecukupan waktu KBP (3,74). Profil ini serupa dengan tahun 2022 tetapi nilai tahun ini lebih tinggi dibanding tahun 2022.

Indeks kepuasan pelaku usaha pada unit penyelenggara KBP (unit kerja di kedeputian III dan Balai Besar/Balai POM) berada pada rentang nilai 90,6 – 99,2 dan persentase capaian target antara 100,0% - 116,8% sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan 2. Seluruh unit kerja telah mencapai target. Indeks kepuasan pelaku usaha di level nasional adalah 96,3 (Sangat Puas) atau capaian target sebesar 107,0% sedangkan indeks kepuasan pelaku usaha per komoditi sebagai berikut: (1) Obat 96,3, (2) Obat Tradisional 95,9, (3) Suplemen Kesehatan 95,7, (4) Kosmetik 96,5, dan (5) Pangan Olahan 96,5 (Tabel 3). Pada tahun 2023 seluruh target indeks komoditi telah tercapai. Tren capaian indeks selama 3 tahun (2020-2022) secara umum menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun ini sebanyak 12628 saran/komentar dari responden diklasifikasikan menjadi 6 kategori yaitu apresiasi (38,38%), petugas/narasumber (3,97%), materi (9,23%), kecukupan waktu (3,44%), penyelenggaraan kegiatan (37,43%), fasilitas pendukung (2,15%), dan hal lain yang tidak termasuk kategori sebelumnya (5,40%). Data

tersebut dapat dimanfaatkan dan ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas KBP dan kinerja unit.

6. Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

Salah satu indikator pada RPJMN 2020-2024 yang digunakan dalam pengukuran efektivitas pengawasan adalah persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, dimana tren realisasi indikator pada tahun 2020 dan 2021 telah melebihi target yang ditetapkan, sehingga penyesuaian target perlu dilakukan.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan) telah melakukan Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha (IKPU) di Bidang Obat dan Makanan pada Tahun 2023. Selain Pengukuran IKPU yang telah rutin dilakukan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga telah menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Probability Sampling sebagai panduan dalam pengambilan sampel sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan agar dapat merepresentasikan populasi pelaku usaha Obat dan Makanan. Selain itu, dilakukan juga pengembangan sistem aplikasi SIMPEDA IKPU dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menganalisis data untuk memperoleh Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan secara langsung dan real time serta telah dilakukan penyebarluasan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dalam dashboard Badan POM Operational Center (BOC). Kajian ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM level 0 pada Sasaran Strategis (SS2) yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kualitas Obat dan Makanan untuk memperoleh Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan. Hasil pengukuran indeks ini akan dibandingkan dengan target indeks sebelumnya sesuai dengan rencana strategis BPOM Tahun 2020-2024. Pengukuran indeks dilakukan pada tingkat Provinsi dan Nasional yang menjadi indikator kinerja kegiatan Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Dalam Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan, data yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan pelaku usaha Obat dan Makanan pada sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan, dan penandaan pada tahun 2022 di seluruh provinsi yang telah dilakukan verifikasi grading oleh Kedeputusan 1, 2, dan 3.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan skala nasional adalah 82,18 (Baik), sedangkan target indeks pada Tahun 2023 adalah 85,00 sehingga persentase capaian adalah 96,68%.
- 2) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan yang dihitung terhadap target indeks kedeputian yaitu indeks Obat sebesar 82,71 (Baik), indeks Obat Tradisional sebesar 87,74 (Baik), indeks Suplemen Kesehatan sebesar 97,80 (Sangat Baik), indeks Kosmetik sebesar 71,62 (Baik), dan Pangan Olahan sebesar 72,62 (Baik).
- 3) Indeks di tingkat provinsi menjadi indikator kinerja kegiatan Balai Besar/Balai/Loka POM dengan indeks tertinggi diperoleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 91,47 (Sangat Baik) dan terendah diperoleh Provinsi Kalimantan Barat sebesar 71,81 (Baik). Berikut 5 provinsi dengan capaian indeks tertinggi.

7. Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat

Rekomendasi terkait indikator adalah melakukan revisi terhadap nomenklatur indikator obat yang memenuhi syarat pada sasaran strategis 1 Renstra BPOM menjadi persentase obat beredar yang memenuhi syarat. Rekomendasi terkait kerangka sampling obat dan NAPPZA adalah pemantauan keamanan dan mutu obat dilakukan melalui 2 cara pemantauan yaitu sampling acak dan sampling targeted. Sampling acak membutuhkan sampel lebih besar dari sampling targeted yang menggunakan pendekatan sentinel surveillance. Populasi dari sampling acak adalah obat yang beredar baik dari sarana penjualan obat yang legal maupun illegal, serta mencakup penjualan secara offline dan online. Proporsi yang disarankan adalah 75% digunakan untuk sampling acak (dilakukan periodik 3-5 tahun sekali) serta 25% untuk sampling targeted (dilakukan setiap tahun). Perhitungan sampel minimal menggunakan rumus estimasi proporsi berdasarkan Lemeshow 1990, dengan Presisi = 1% dan $\alpha = 5\%$ dengan proporsi Produk yang Tidak Memenuhi Syarat = 8%, maka total sampel obat dan NAPPZA adalah 32.000 sampel. Untuk indikator persentase obat beredar yang memenuhi syarat, kerangka sampling yang direkomendasikan adalah dari sampling acak yang dilakukan secara periodik 3-5 tahun sekali dan tidak menjadi ukuran kinerja

UPT. Sampling targeted dilakukan untuk melindungi masyarakat dari obat yang tidak bermutu (sub-standard) atau obat yang palsu (falsified) karena kedua hal ini merugikan masyarakat. Pendekatan yang disarankan adalah dengan pendekatan sentinel surveillance baik secara aktif maupun pasif. Sentinel survey (sampling targeted) akan menjadi kinerja dari masing-masing UPT. Demikian halnya untuk kerangka sampling pangan olahan, ada dua jenis pemantauan yang dilakukan yaitu melalui sampling acak dan sampling targeted. Sampling acak dilakukan secara periodik 3-5 tahun sekali dan tidak menjadi kinerja dari UPT, sedangkan sampling targeted yang menggunakan pendekatan sentinel surveillance merupakan kinerja dari UPT. Sampling acak membutuhkan sampel yang lebih besar dari pada sampling targeted atau sentinel survey. Proporsi yang digunakan untuk sampling acak adalah 70% dan sampling targeted atau sentinel surveillance 30%. Disarankan untuk memasukkan populasi pangan jajanan anak sekolah (PJAS) ke dalam sampling acak dan dilakukan secara random untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, tanpa kriteria sekolah yang diintervensi. Perhitungan sampel dengan menggunakan rumus estimasi proporsi berdasarkan Lemeshow 1990, dengan Presisi = 1,5% dan $\alpha = 5\%$ dengan proporsi pangan yang tidak memenuhi ketentuan sebesar =14,8%, berdasarkan Laporan Kinerja BPOM tahun 2022 maka total sampel pangan olahan adalah 26.000 sampel.



Gambar 3. 3 *Focus Group Discussion* Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan yang Memenuhi Syarat

8. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan

BPOM melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan. Salah satu strategi dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM adalah pengumpulan data kasus keracunan yang dilaporkan dalam aplikasi Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer KLB - KP). Dalam rangka mengetahui dan mendapatkan gambaran kasus keracunan yang terjadi di Indonesia, maka kasus keracunan Obat dan Makanan yang terjadi perlu dilakukan analisis. Diharapkan hasil analisis data kasus keracunan Obat dan Makanan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak terkait dan rekomendasi dalam menetapkan suatu kebijakan pencegahan kasus keracunan Obat dan Makanan oleh BPOM.

Ruang lingkup kajian terdiri dari kasus keracunan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan (termasuk pangan segar). Dari hasil kajian tersebut diharapkan dapat diketahui informasi dan tren kasus keracunan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh Indonesia. Selain itu dilakukan juga survei monitoring dan evaluasi online untuk mengetahui kendala/permasalahan yang dihadapi oleh petugas penginput data kasus keracunan Obat dan Makanan dan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan dalam aplikasi SPIMKer KLB-KP oleh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Sebanyak 1.722 data kasus keracunan (misuse, abuse, keracunan pangan) yang disebabkan oleh: Obat, Obat tradisional, Suplemen kesehatan, Kosmetik, Pangan dan Campuran telah dianalisis. Berdasarkan sebaran kasus per komoditi diketahui bahwa mayoritas kasus yakni 1110 kasus (64,46%) keracunan yang terjadi diakibatkan oleh Makanan dan Minuman, kemudian diikuti dengan kasus keracunan yang diakibatkan oleh Obat/NAPPZA sejumlah 463 kasus (26,89%), kasus Campuran 112 kasus (6,50%), Kosmetik sebesar 22 kasus (1,28%), Obat Tradisional sebanyak 12 kasus (0,70%) dan kasus keracunan akibat produk Suplemen Kesehatan sebanyak 3 kasus (0.17%).

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa dari 10 variabel yang dianalisis, 8 variabel berhubungan signifikan dengan kasus keracunan pangan yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, tipe kejadian, tempat kejadian, rute pemaparan dan kondisi setelah IGD, sedangkan terdapat 2 variabel tidak

signifikan berhubungan dengan kasus keracunan pangan yaitu kondisi pupil dan kesadaran.

Hasil analisis multivariat telah diperoleh $R^2 = 27.9\%$ yang berarti variable di model ini sudah menjelaskan 27,9% dari seluruh faktor(variabel) yang berhubungan dengan keracunan pangan.

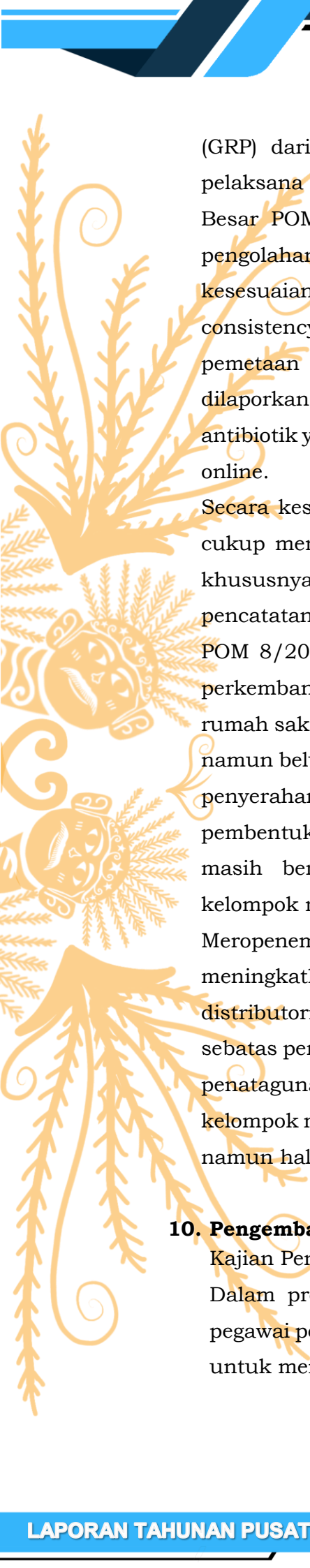
Tren kasus keracunan Obat dan Makanan per provinsi pada periode 3 tahun (2021 sd 2023), kasus keracunan terbanyak adalah komoditi Pangan Olahan, Obat dan Campuran.

9. Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian

Pada tahun 2021, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melaksanakan kajian profil peredaran antimikroba yang beredar di Indonesia dari data hasil Survei Obat Beredar tahun 2019 untuk memperoleh gambaran sebaran jenis antimikroba. Hasil kajian menemukan bahwa terdapat antibiotik kelompok reserve ditemukan beredar tidak sesuai ketentuan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dalam pengawasan yang dilakukan Badan POM karena antibiotik kelompok reserve merupakan prioritas program pengendalian resistensi antimikroba secara nasional dan internasional yang dipantau dan dilaporkan penggunaannya. Oleh karena itu, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melaksanakan analisis lebih lanjut terkait antibiotik kelompok reserve untuk melihat regulasi/pengaturannya serta penerapan dari regulasi tersebut di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Tujuan umum analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan/kekurangan pada regulasi, pada penerapan dan/atau mekanisme pengawasan yang berpotensi menjadi kendala dalam upaya penanggulangan AMR. Tujuan khusus analisis kebijakan ini adalah :

- a) melakukan tinjauan regulasi (legal review) terkait pengawasan antibiotik kelompok reserve untuk mendapatkan gambaran ketercukupan substansi dari aspek legality, consistency, dan clarity;
- b) menemukan bukti praktek pengendalian resistensi antimikroba di fasilitas pelayanan kesehatan/kefarmasian; dan
- c) menemukan bukti pengawasan antibiotik kelompok reserve di fasilitas pelayanan kesehatan/kefarmasian.

Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa metode meliputi telaah regulasi/kebijakan menggunakan pendekatan Good Regulatory Practices

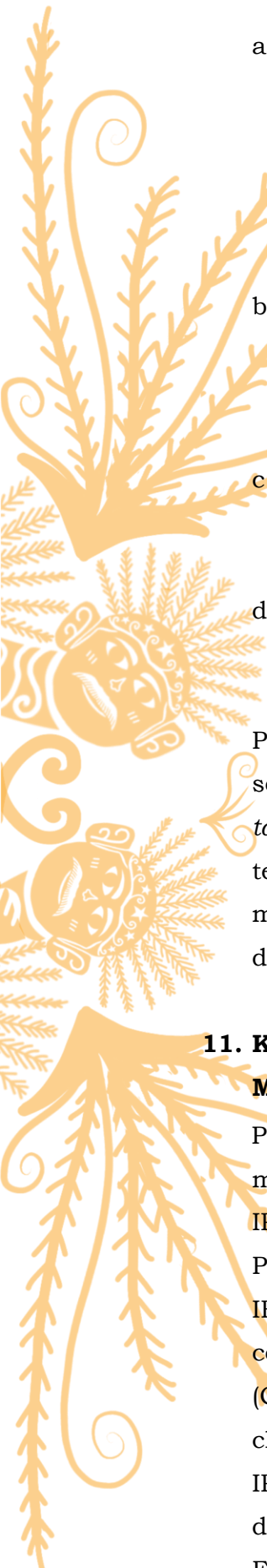


(GRP) dari WHO, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pengambil dan pelaksana kebijakan, observasi dan wawancara mendalam dengan Balai Besar POM, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit di 6 lokasi studi, serta pengolahan data sekunder lainnya. Telaah regulasi dilakukan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip GRP yang paling relevan yaitu legality, consistency, dan clarity. Data sekunder yang dianalisis meliputi data pemetaan pengelolaan antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian yang dilaporkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, data penyaluran antibiotik yang dilaporkan oleh PBF, dan data penjualan antibiotik di platform online.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada dianggap cukup memadai, namun diperlukan penguatan implementasi di lapangan, khususnya terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan, sosialisasi, pencatatan dan pelaporan, monev, serta penegakan sanksi. Peraturan Badan POM 8/2020 dirasa perlu untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan terbaru. Kebijakan pengendalian AMR telah ada di seluruh rumah sakit karena adanya kewajiban dari peraturan akreditasi rumah sakit, namun belum ada prioritas untuk monev berkala dan sistematis. Pengelolaan penyerahan/penggunaan antibiotik reserve telah dilakukan melalui pembentukan Komite PRA di tiap rumah sakit, namun implementasinya masih beragam karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antibiotik kelompok reserve yang banyak digunakan di semua tipe rumah sakit adalah Meropenem. Informasi ini dapat menjadi masukan bagi Badan POM untuk meningkatkan pengawasan produk ini atau industri farmasi atau distributornya. Peran Badan POM dalam pengawasan antibiotik adalah sebatas penatakelolaan/administratif dan tidak dapat masuk lebih jauh pada penatagunaan. Ada peluang Badan POM mengontrol penyaluran antibiotik kelompok reserve ke sarana yang tidak semestinya seperti fasyankes pertama, namun hal ini perlu ada regulasi sebagai dasar pelaksanaannya.

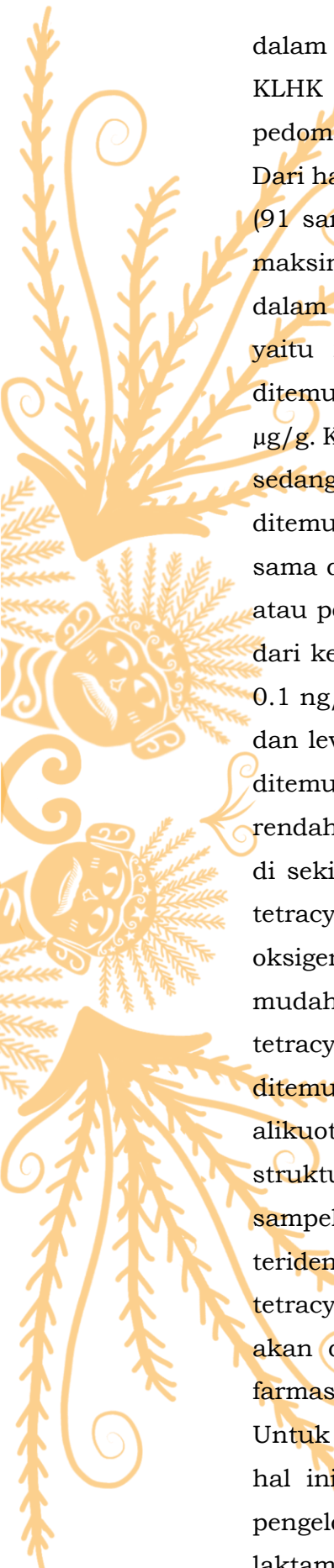
10. Pengembangan Kapasitas dan Karier Talenta

Kajian Pengembangan Kapasitas dan Karier Talenta perlu dilakukan karena Dalam proses pengelolaan talenta di lingkungan BPOM, dengan jumlah pegawai per 1 Juli 2023 sebanyak 4965 orang perlu dilakukan *talent scouting* untuk mengidentifikasi beberapa kategori pegawai berikut:

- 
- a. *Superkeepers* : merupakan pegawai unggul yang saat ini sangat melebihi ekspektasi dan diproyeksikan untuk terus seperti itu di masa depan. *Superkeepers* yang mampu menghasilkan kinerja unggul, yang memberikan inspirasi kepada karyawan lainya untuk menghasilkan kinerja unggul juga, biasanya jumlah *Superkeepers* antara 3% - 5% dari seluruh sumber daya manusia di suatu organisasi.
 - b. *Keepers* : merupakan pegawai yang melebihi ekspektasi dan diproyeksikan untuk terus begitu di masa depan, biasanya jumlah *Keepers* sekitar 20% dari seluruh sumber daya manusia di suatu organisasi.
 - c. *Solid citizens* : merupakan pegawai yang memenuhi ekspektasi, biasanya jumlah *Solid citizens* sekitar 75% dari seluruh sumber daya manusia di suatu organisasi.
 - d. *Misfits* : merupakan pegawai yang berada di bawah ekspektasi. Pegawai berada pada kategori ini karena kinerja yang rendah dan atau kompetensi yang rendah dalam melaksanakan tugas mereka,
- Pegawai yang harus dikelola dalam proses pengelolaan talenta adalah sebanyak 25% dari 4965 orang yaitu sebanyak 1242 orang dengan kategori *talent pool Super keeper* dan *Keeper*. Jumlah talenta yang dikelola dapat terus berubah sesuai dengan jumlah pegawai BPOM. Pengelolaan manajemen talenta sendiri merupakan suatu proses berkelanjutan mulai dari pegawai masuk hingga pegawai pensiun.

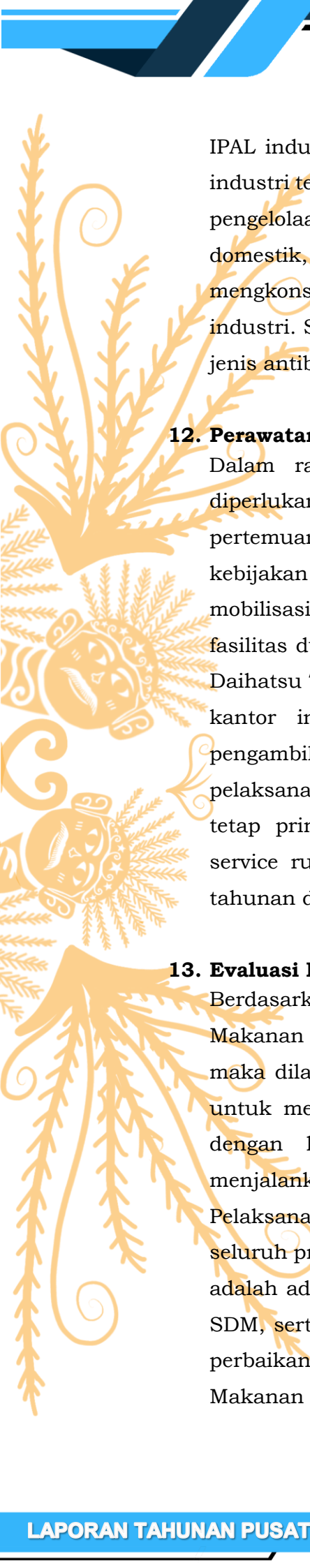
11. Kajian Polutant Farmasi pada Air Baku Minum dan Produksi Obat dan Makanan

Pada tahun 2023 ini, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melanjutkan kajian polutan antibiotik yang berfokus terhadap beberapa IPAL IF yang memproduksi antibiotik pada 7 provinsi yaitu IPAL IF Palembang, IPAL IF DKI Jakarta, IPAL IF Banten, IPAL IF Jawa Barat, IPAL IF Jawa Tengah, IPAL IF Yogyakarta, dan IPAL IF Jawa Timur. Sedangkan cemaran antibiotik yang di monitor adalah 5 jenis antibiotik ciprofloxacin (CIP), levofloxacin (LVX), cefixime (CFX), tetracycline (TTC), dan chloramphenicol (CAP)] yang diidentifikasi dan dikuantifikasi pada outlet IPAL industri farmasi dan perairan di sekitarnya. Diharapkan hasil kajian ini dapat menggambarkan kondisi pengelolaan limbah antibiotik oleh Industri Farmasi dan dapat dijadikan dasar penguatan pengawasan Badan POM



dalam pengawasan limbah hasil produksi Obat serta rekomendasi pada KLHK untuk meregulasi pengawasan limbah farmasi dan pembuatan pedoman terkait baku mutu polutan farmasi di perairan.

Dari hasil analisis sampel telah teridentifikasi antibiotik LVX sebesar 73.4 % (91 sampel), dengan rentang nilai 0.1ng/g hingga kisaran 200 µg/g. Nilai maksimal konsentrasi LVX yang ditemukan yaitu sekitar 5 ug/g. Sedangkan dalam sampel sedimen, nilai maksimal konsentrasi LVX yang ditemukan yaitu 234 ug/g. Antibiotik CIP ditemukan dengan persentase 59.2%, ditemukan di 72 sampel dengan rentang konsentrasi 0.1 ng/g hingga 100 µg/g. Konsentrasi tertinggi CIP (100 µg/g) ditemukan dalam sampel sedimen, sedangkan untuk sampel cairan (atau alikuot sedimen) konsentrasi CIP ditemukan tertinggi pada 90 µg/g. Keberadaan CIP dengan level kurang lebih sama di sampel sedimen maupun cairan menjadi catatan juga untuk studi atau pembahasan lebih lanjut. Antibiotik CAP ditemukan dalam 25 sampel dari keseluruhan sampel yang diukur (20,2%) dengan rentang konsentrasi 0.1 ng/g hingga 1.6 µg/g. Level tertinggi ditemukan dalam sampel sedimen dan level tertinggi untuk sampel cairan (atau sampel alikuot dari sedimen) ditemukan pada 40 ng/g. Senyawa TTC ditemukan dalam frekuensi yang rendah, yaitu dalam 3 sampel dengan rentang konsentrasi 13.1 ng/g hingga di sekitar 1 µg/g. Selain karena produksinya tidak banyak juga stabilitas tetracycline dipengaruhi oleh faktor pH, temperature, cahaya, keberadaan oksigen dan ion logam. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan tetracycline mudah terdegradasi membentuk 4-epitetracycline (ETC), anhydro-tetracycline (ATC) and 4-epianhydrotetracycline (EATC). Senyawa CFX tidak ditemukan di seluruh sampel baik sampel cairan, sedimen, maupun alikuotnya. Cefixime (CFX) merupakan golongan cephalosporin memiliki struktur cincin β-lactam yang rentan terhadap degradasi. Dari hasil analisis sampel air limbah pada beberapa outlet IPAL industri farmasi masih teridentifikasi cemaran antibiotik levofloxacin (LVX), ciprofloxacin (CIP), tetracycline (TTC), dan chloramphenicol (CAP) dengan kadar beragam yang akan dialirkan ke badan air, hal ini menunjukkan bahwa IPAL industri farmasi belum sepenuhnya dapat menghilangkan sisa-sisa hasil produksi. Untuk antibiotik Cefixime (CFX) tidak teridentifikasi pada semua outlet IPAL, hal ini karena industri farmasi yang memproduksi CFX telah memiliki pengelolaan limbah beta laktam yang baik untuk memutus cincin beta laktam sebelum dilakukan pengelolaan limbah. Teridentifikasi pada outlet



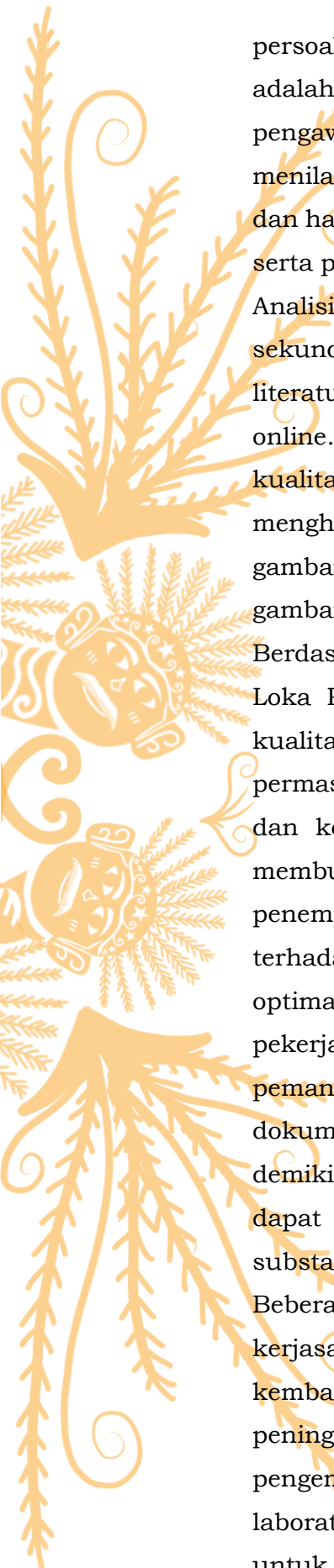
IPAL industri farmasi jenis senyawa antibiotik yang tidak diproduksi oleh industri tersebut, hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal seperti pengelolaan limbah industri menjadi satu dengan pengelolaan limbah domestik, sehingga kemungkinan hasil ekskresi dari personal yang mengkonsumsi antibiotik tersebut masuk ke dalam pengelolaan limbah industri. Selain itu dapat juga disebabkan oleh industri yang memproduksi jenis antibiotik tersebut namun tidak dilaporkan ke BPOM.

12. Perawatan Kendaraan Kantor

Dalam rangka pelaksanaan analisis kebijakan Obat dan Makanan, diperlukan akses untuk melakukan mobilisasi terkait dengan pelaksanaan pertemuan dan *Focus Group Discussion* untuk seluruh kegiatan analisis kebijakan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Untuk mendukung mobilisasi tersebut Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki fasilitas dua (2) kendaraan roda 4 yaitu 1 unit Kijang Innova dan 1 unit Daihatsu Terios dan 1 kendaraan roda 2 yaitu Motor Vario 150. Kendaraan kantor ini digunakan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor, pengambilan sampel produk, pelaksanaan survei ke masyarakat dan pelaksanaan meeting di Jabodetabek. Untuk memastikan kondisi kendaraan tetap prima, dilakukan pemeliharaan kendaraan kantor yang meliputi service rutin, pengisian bahan bakar secara berkala, pengurusan pajak tahunan dan maintenance lain yang diperlukan.

13. Evaluasi Program Penataan dan Perkuatan UPT POM

Berdasarkan mandat Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015- 2019 untuk memperkuat peran dan fungsi Badan POM, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sehingga sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Badan POM dibantu oleh 33 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar POM dan Balai POM yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Loka POM adalah adanya keterbatasan koordinasi dengan lintas sektor, ketersediaan SDM, serta beban kerja yang ada di Loka POM. Untuk mendukung upaya perbaikan dan penguatan Loka POM, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melakukan kajian terkait efektivitas Loka POM dan memotret

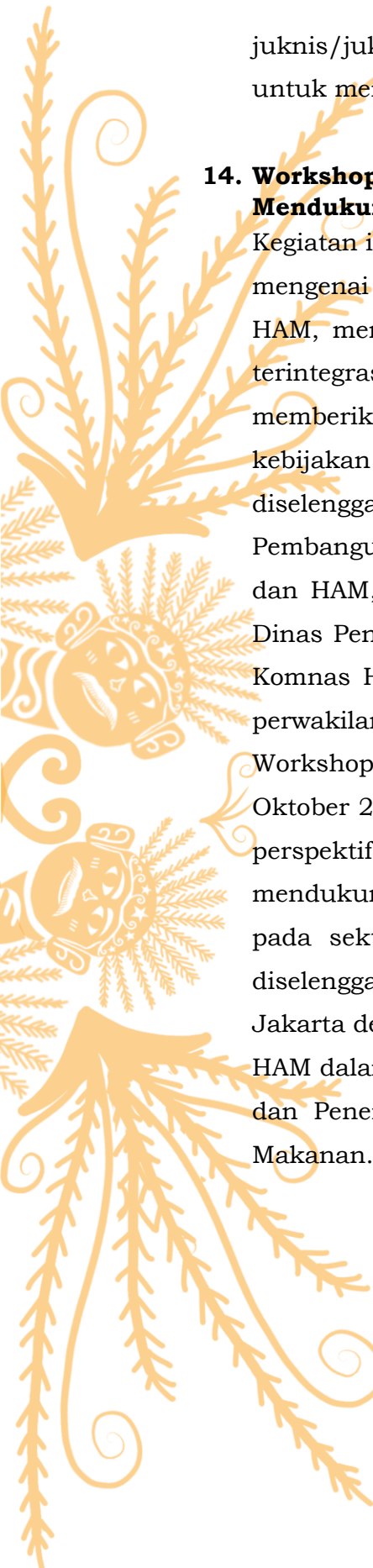


persoalan dan kendala yang dihadapi. Tujuan umum yang ingin dicapai adalah untuk melihat gambaran eksistensi Loka POM dalam konstelasi pengawasan Obat dan Makanan. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah menilai efektivitas Loka POM yang mencakup penilaian terhadap tantangan dan hambatan, pencapaian target kinerja, permasalahan internal Loka POM, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk penguatan Loka POM.

Analisis data menggunakan berbagai data baik data primer maupun data sekunder dari internal BPOM. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam, serta survei online. Metode analisis pada umumnya menggunakan metode kuantitatif, kualitatif dan statistika deskriptif. Data diolah dan dianalisis untuk menghasilkan beberapa output yaitu gambaran kinerja Loka POM, gambaran eksistensi Loka POM di mata internal dan eksternal, serta gambaran SDM Loka POM.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Loka POM sudah memiliki capaian kinerja yang efektif, namun secara kualitas masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Secara umum, permasalahan SDM ada pada keterbatasan jumlah SDM, pola karir pegawai, dan kompetensi pegawai. Keterbatasan jumlah SDM yang ada di UPT membuat pegawai melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan penempatannya sehingga berdampak pada rendahnya kepuasan pegawai terhadap beban kerja dan membuat kualitas hasil pekerjaan menjadi tidak optimal. Selain itu, Loka POM membutuhkan SDM untuk melakukan pekerjaan administratif termasuk arsiparis, sehingga perlu dipertimbangkan pemanfaatan sistem teknologi informasi yang memudahkan pengelolaan dokumen dan menyediakan laporan dengan format terstandar. Dengan demikian, SDM yang seharusnya tidak mengerjakan pekerjaan administratif dapat melakukan shifting kepada pekerjaan yang bersifat lebih substantif/teknis.

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan diantaranya perkuatan kerjasama Loka POM dengan OPD dengan membuat MoU, peninjauan kembali terhadap beban kerja dan distribusi kompetensi pegawai, peningkatan kemampuan manajerial IT seluruh SDM Loka POM, pengembangan jenjang karir untuk pegawai, prioritas pembangunan laboratorium pengujian secara bertahap, pemanfaatan teknologi informasi untuk otomasi bisnis pengawasan obat dan makanan, serta perlu penyiapan



juknis/juklak yang lebih detail dan mudah dipahami oleh pegawai Loka POM untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM.

14. Workshop Series Terkait Penyusunan Kebijakan Pro HAM dan Demokrasi Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai urgensi penguatan regulasi BPOM berkaitan dengan isu bisnis dan HAM, meningkatkan kompetensi SDM penyusun analisis kebijakan yang terintegrasi dengan isu HAM di sektor pengawasan Obat dan Makanan, dan memberikan gambaran menyeluruh dari berbagai perspektif mengenai kebijakan BPOM yang telah ada terkait isu bisnis dan HAM. Workshop ini diselenggarakan dengan melibatkan SETARA Institute, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, Komnas HAM, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia serta seluruh perwakilan unit kerja pusat BPOM.

Workshop sesi I diselenggarakan di Hotel Grand Mansion, Menteng pada 16 Oktober 2023 yang membahas mengenai gambaran bisnis dan HAM dalam perspektif kebijakan hukum di Indonesia, Koherensi kebijakan dalam mendukung Implementasi HAM, Introdusir standar HAM dan keberlanjutan pada sektor industri Obat dan Makanan. Kemudian workshop sesi II diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2023 di Hotel Grand Mercure Jakarta dengan pembahasan mengenai Tantangan Implementasi Bisnis dan HAM dalam sektor kesehatan, penanganan kasus HAM di sektor Kesehatan dan Penerapan standar HAM dan keberlanjutan pada sektor Obat dan Makanan.



Gambar 3. 4 Workshop Series Terkait Penyusunan Kebijakan Pro HAM dan Demokrasi

IKSK 1.2 Indeks Kepuasan Internal Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Perlengkapan sarana dan prasarana penunjang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas kinerja suatu organisasi. Perlengkapan sarana dan prasarana penunjang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas kinerja suatu organisasi, sehingga analisis dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan meningkatkan layanan baik internal maupun eksternal.

Untuk menunjang tercapainya sasaran tersebut di atas pada Tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan

Dalam peningkatan infrastruktur pendukung Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor seperti: pengadaan pulsa kepada setiap pegawai, Lisensi *video conference zoom*, lisensi aplikasi desain, lisensi aplikasi *cloud storage*. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

2. Pengadaan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor seperti: keperluan pokok, lisensi aplikasi Tableau, biaya pengiriman surat, penggandaan, pencetakan, dan Alat Tulis Kantor. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

Dalam meningkatkan kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melakukan Pengadaan fasilitas perkantoran dalam menunjang pelaksanaan analisis dan kebijakan pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Daftar Pengadaan Fasilitas Perkantoran Tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah	Penempatan
1	Screen Proyektor	1	Ruang Staf
2	Kulkas	1	Ruang Pantry
3	Delegate Mic Conference	1	Ruang Rapat
4	Webcam	1	Ruang Rapat
5	Modem	1	Ruang Staf
6	Stabilizer Camera	1	Ruang Staf

SK 2 : Tersedianya perencanaan analisis kebijakan sesuai kebutuhan

IKSK 2 : Persentase Analisis Kebijakan Yang Sesuai Dengan Perencanaan

1. Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga

Dalam rangka mengembangkan kegiatan riset maupun membangun jejaring yang mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan di luar negeri. Kerjasama tersebut dalam bentuk kepakaran, kolaborasi maupun kerjasama lainnya.

Melalui kolaborasi nasional dan internasional, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan serta peningkatan kemampuan dan capaian kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Perjalanan dalam rangka kerjasama antar instansi antara lain dalam rangka:

- a. Mengikuti lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Memperkuat Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di BPOM di Denpasar Bali
- b. Melaksanakan pendampingan kunjungan kerja komisi IX DPR RI dalam rangka kerjasama antar instansi di Kalimantan Timur

2. Koordinasi Internal dan Eksternal

Koordinasi Pusat Analisis Obat dan Makanan tahun 2023 adalah dengan mengikuti rapat evaluasi nasional (REN) yang diadakan di Yogyakarta dengan tema "Semangat Kolaborasi, Mewujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang Berintegritas menuju Indonesia Maju". Tema ini sejalan dengan tema RKP 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

SK 3 : Terlaksananya Penyelenggaraan Analisis Kebijakan Yang Sesuai Pedoman Analisis Kebijakan


IKSK 3 : Persentase Kesesuaian Analisis Kebijakan Dengan Pedoman Analisis Kebijakan

1. Penerapan Sistem Mutu

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan senantiasa menerapkan Sistem Quality Management System (QMS) sesuai dengan manual organisasi yang ditetapkan. Kegiatan tersebut meliputi :

- a. Kaji Ulang Dokumen

Kaji Ulang Dokumen merupakan salah satu kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem mutu ISO 9001:2015 secara konsisten terutama yang terkait dengan dokumen. Pelaksanaan Kaji Ulang Dokumen meliputi kegiatan melakukan tinjau ulang seluruh dokumen yang digunakan dan



kesesuaian prosedur dengan formulir yang digunakan; melakukan inventarisasi dokumen sesuai kebutuhan; dan melakukan pembahasan terhadap usulan perubahan dokumen. Total dokumen Standar Prosedur Operasional (SOP) Mikro Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan saat ini adalah sebanyak 6 SOP Mikro.

b. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan (continual improvement) dari waktu ke waktu, melalui proses pengkajian secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu serta meningkatkan kompetensi laboratorium secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebanyak 2 kali pertemuan. Rapat Tinjauan Manajemen pertama dilaksanakan pada tanggal 1 -2 Maret 2023 yang di Hotel Margo, Depok dengan mengundang narasumber dari BPKP yaitu Ibu Lady Martha Napitupulu dengan materi Konsep Kinerja, Perencanaan dan Penganggaran. Rapat Tinjauan Manajemen kedua pada tanggal 27 Juni 2023 di Hotel Margo, Depok.

c. Audit Internal

Audit internal ISO 9001:2015 dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Juni 2023 oleh auditor internal dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Obat dan Makanan atas nama Asri Yusnitasari, S.Si. Apt., Perdhana Ai Sudewa, dan Trida Himma Zevita, SE. Audit bersifat sampling dengan tidak melihat seluruh data melainkan hanya mengambil sampel data pada kurun waktu tertentu. Dari hasil audit tersebut, jumlah temuan 4 dengan kategori NC: 0 dan AFI: 4 dan Aspek Positif 2. Seluruh temuan sudah berstatus closed.

d. Audit Eksternal

Pelaksanaan audit eksternal ISO 9001:2015 dilakukan oleh Lembaga auditor PT. SUCOFINDO dilaksanakan pada 7 - 8 September 2023 dengan auditor atas nama Mochamad Taufiq H dan Lucky Satyanegara. Dari hasil audit tersebut, jumlah temuan 0 dengan kategori NC: 0 dan AFI: dan Aspek Positif 5. Seluruh temuan sudah berstatus closed.

Berdasarkan hasil audit eksternal, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berhasil memperoleh kembali sertifikat ISO 9001:2015.

SK 4 : Terdiseminasinya Hasil Analisis Kebijakan yang Optimal

IKSK 4 : Nilai Kualitas Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan

1. Pengembangan Subsite Sistem Informasi Riset

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sudah membangun website yang dinamakan dengan Sistem Informasi Riset sejak 2015. Sistem Informasi Riset ini menjadi domain untuk memuat informasi terkait unit kerja serta menjadi sarana publikasi kegiatan

Guna mempermudah diseminasi informasi terkait kegiatan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan serta mempermudah *stakeholder* dalam mengakses layanan survei yang dilakukan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tanpa terbatas jarak dan waktu maka Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Riset pada Tahun Anggaran 2023. Penyempurnaan ini juga merupakan bentuk dukungan percepatan e government di Indonesia.

Tahun 2023 dilakukan pengembangan subsite sistem informasi riset dengan beberapa fitur sebagai berikut:

- a. Redesain Tampilan Website Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan dengan Menyesuaikan sesuai *template* website BPOM
- b. Fitur Monev pada Webcontrol SIR connect API dengan website Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM
- c. Fitur Formulir lembur pegawai
- d. Menu Policy Brief
- e. Menu Laporan subsite PUSAKOM

2. Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022

Kegiatan Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022 dilaksanakan pada hari Jum'at, 28 Juli 2023 di Hotel Holiday Inn Bandung. Acara dibuka oleh Sekretaris Utama Badan POM dan dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan POM, Perwakilan dari Unit Kerja Pusat dan UPT di seluruh Indonesia, serta narasumber penanggung yaitu Pungkas Bahjuri Ali, S.T.P., MS., Ph.D (Direktur

Kesehatan dan Gizi Masyarakat); Prof. Dr. rer. Nat. Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si (Guru Besar Sekolah Farmasi ITB); Prof. Dr. Keri Lestari Dandan, M.Si., Apt. (Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik, Universitas Padjadjaran); Dr. Amelia Cahyadi, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran); dr. Iwan Ariawan, M.S.P.H. (Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia).

Tema Kajian yang dikonsultasikan diantaranya adalah *Preliminary Study Antimicrobial Resistance (AMR)* pada Pangan Olahan, Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan makanan terkait Pemberian Sanksi Denda terhadap Pelanggaran pada Industri Obat, dan Profil Obat dan Makanan yang Beredar secara Daring. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mempertimbangkan semua masukan dan melakukan penyempurnaan terhadap rencana analisis kebijakan yang akan dilakukan.



Gambar 3. 5 *Focus Group Discussion* Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022

3. Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022

Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan ini diselenggarakan secara luring dan daring pada tanggal 31 Maret 2023 di Padma Resort Legian, Bali. Kegiatan diikuti oleh masing-masing 1 (satu) orang dari 29 unit kerja di Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM di seluruh Indonesia dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang terkait. Terdapat 10 hasil analisis kebijakan pada tahun 2022 yang didiseminasikan, yaitu 6 kajian ilmiah dalam bentuk presentasi oral dan sisanya dalam bentuk poster ilmiah.

Tujuan kegiatan ini antara lain menyebarluaskan hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2022 di lingkungan BPOM dan *stakeholder* terkait agar dapat dimanfaatkan, selain itu untuk mewujudkan hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan yang tepat arah, tepat guna, dan bermanfaat serta meningkatkan kerja sama antar unit dan Kementerian/Lembaga untuk menunjang pengawasan Obat dan Makanan.

Diharapkan forum ini dapat memberikan hasil antara lain: mendapatkan arahan Kepala BPOM terkait hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2022, mendiseminasikan hasil Analisis Kajian yang telah dilakukan pada tahun 2022, forum diskusi dan ide untuk dapat solusi yang kreatif dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan pemanfaatan hasil Analisis Kebijakan; meningkatkan budaya inovasi dan pembelajaran organisasi di BPOM, menciptakan iklim ilmiah untuk mendukung pembelajaran bagi pegawai BPOM.



Gambar 3. 6 Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022 di Bali



Gambar 3. 7 Peserta Undangan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022 di Bali

4. Publikasi Hasil Analisis Kebijakan

Untuk menginformasikan hasil Analisis Kebijakan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan kepada masyarakat ilmiah dan memberi kesempatan kepada Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam pengembangan profesi, maka hasil Analisis Kebijakan dapat dipublikasikan dalam bentuk makalah poster dan makalah oral pada seminar ilmiah nasional dan internasional. Adapun publikasi hasil Analisis Kebijakan yang sudah dilaksanakan yaitu sebagai *oral presenter AUA Academic Conference on Public Health Resilience in the COVID-19 Pandemic Faculty of Public Health UI Science Festival (SciFes)*. Publikasi hasil analisis kebijakan yang dilakukan pada tahun 2023 terdapat pada Lampiran 3.

5. Sosialisasi Obat dan Makanan yang Baik dan Aman Tahun 2023

Pada tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dipercayakan melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan bersama dengan Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Charles Honoris. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 22 lokasi di Jakarta dengan melibatkan Tokoh Masyarakat bersama Masyarakat sekitar.



Gambar 3. 8. Kegiatan KIE bersama dengan Anggota Komisi IX DPR RI

SK 5 : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan

IKSK 5 : Tingkat Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan

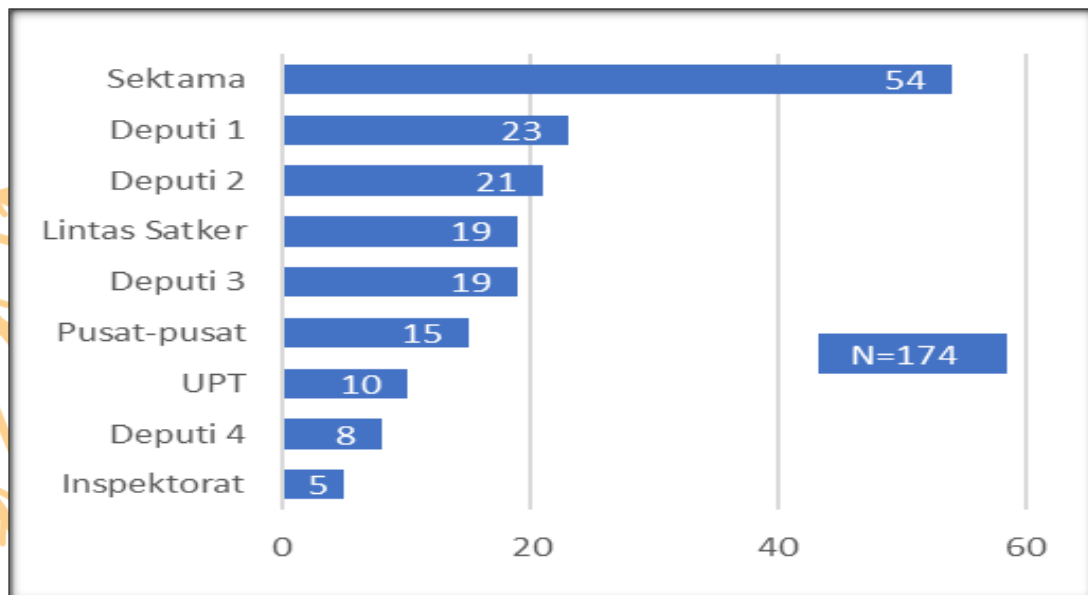
1. Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan

Pada tanggal 25 Mei 2023 dilaksanakan Workshop Dukungan Strategis sebagai forum peningkatan kapasitas, koordinasi, dan sosialisasi pelaksanaan fungsi Dukungan Strategi Pimpinan terkini kepada stakeholder internal BPOM. Workshop dilaksanakan secara hybrid di Harris Hotel and Convention Bekasi dan zoom meeting. Sebanyak ±160 peserta menghadiri workshop mewakili unit kerja pusat, tim Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan, serta UPT. Pada sesi pagi, dua narasumber eksternal dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia membahas tentang penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk menunjang fungsi DSP.



Gambar 3. 9 Workshop Dukungan Strategis Pimpinan

Selama 2023, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mengelola +295 paket dokumen substansi kegiatan Kepala BPOM yang terdiri dari 163 paket bahan bicara dan 132 paket bahan referensi. Bahan ini disiapkan untuk 174 kegiatan Kepala BPOM dengan sebaran keterkaitan topik kegiatan atau substansi bahan dengan ranah tugas dan fungsi Satuan Kerja (Satker) dapat dilihat pada Gambar 3.10 Statistik bahan kegiatan Kepala BPOM pada tahun 2023 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak +285 paket bahan substansi kegiatan Kepala BPOM



Gambar 3. 10 Sebaran Keterkaitan Topik Kegiatan 2023 dan Satker BPOM Pusat

Sebagai inovasi untuk mendorong praktik baik penyusunan bahan substansi Pimpinan di lingkungan BPOM, Tim DSP menginisiasi pengembangan pedoman. Pedoman disusun untuk melengkapi SOP Ketersediaan Dokumen Substansi Teknis Pimpinan. Konsep pedoman dikembangkan sejak 2019 dan terus disempurnakan seiring dinamika fungsi DSP pada khususnya serta lingkungan strategis BPOM pada umumnya. Sebagian besar isi pedoman ditulis berdasarkan pengalaman tim DSP mengelola bahan kegiatan Kepala BPOM. Selain itu, pedoman diperkaya dengan muatan isi bersumber dari arahan Pimpinan, masukan unit kerja yang berkoordinasi dan berinteraksi dengan tim DSP, dan *benchmarking* praktik baik pelaksanaan fungsi sejenis di Kementerian/Lembaga lain



Gambar 3. 11 Workshop Penyusunan Pedoman Bahan Substansi Kegiatan Pimpinan BPOM

2. Analisis Kebijakan Strategis

Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Tim DSP pada 2023 adalah meningkatkan pendokumentasian dan pemanfaatan bahan substansi Pimpinan khususnya bahan pidato. Terinspirasi dari Buku Pidato Tematik Presiden, tim DSP menginisiasi penyusunan konsep awal buku sejenis dengan membuat artikel tematik di bidang pengawasan obat dan makanan

dari bahan pidato Kepala BPOM 2016-2023. Tim DSP telah menyusun 23 artikel lepas yang disusun bersumber dari bahan pidato Kepala BPOM pada beberapa kegiatan sejenis atau serumpun. Kumpulan artikel tersebut rencananya akan dikemas dalam buku Bunga Rampai di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Selain sebagai dokumen yang lebih terintegrasi, buku ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi serta lesson learned untuk menambah wawasan insan BPOM terkait gagasan kebijakan pimpinan yang terdapat dalam bahan pidato Kepala BPOM.



Gambar 3. 12 Workshop Peningkatan Manfaat Bahan Substansi Strategis Pimpinan

Beberapa pertemuan dan diskusi tim DSP bersama perwakilan unit kerja terkait tentang penyusunan buku kumpulan artikel atau bunga rampai telah dilaksanakan selama 2023. Workshop Peningkatan Manfaat Bahan Substansi Strategis Pimpinan pada 5 April 2023 di The Margo Hotel, Depok menghadirkan narasumber dari Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet yang berbagi Strategi Penyusunan Buku Tematik Pidato Presiden. Selanjutnya dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada 18 Juli 2023 dan Workshop pada 22 November 2023 di The Margo Hotel, Depok. Kedua forum menghadirkan praktisi bahasa Indonesia dari IKIP Siliwangi untuk memberikan pencerahan tentang penyusunan artikel dan buku bunga rampai serta masukan terhadap konsep artikel yang telah disusun tim DSP.



Gambar 3. 13 Focus Group Discussion (FGD) 18 Juli 2023



Gambar 3. 14 Workshop Penyusunan Buku Bunga Rampai di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

3. Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan

Pendampingan kegiatan kedinasan Kepala BPOM untuk mengawal bahan substansi dan mendokumentasikan arahan lisan serta hasil kegiatan yang dihadiri Kepala BPOM. Sepanjang 2023, dilakukan pendampingan pada 208 kegiatan Kepala BPOM baik secara *offline* maupun *online*. Kegiatan pendampingan ini dilaporkan melalui 146 nota dinas dari Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya terkait maupun Kepala Pusat-Pusat terkait. Arahan lisan Kepala BPOM yang harus segera ditindaklanjuti pada waktu yang terbatas, seperti arahan terkait pelaksanaan kegiatan esok hari disampaikan kepada unit kerja penanggung jawab kegiatan berupa *keypoints* hasil pertemuan melalui aplikasi percakapan.

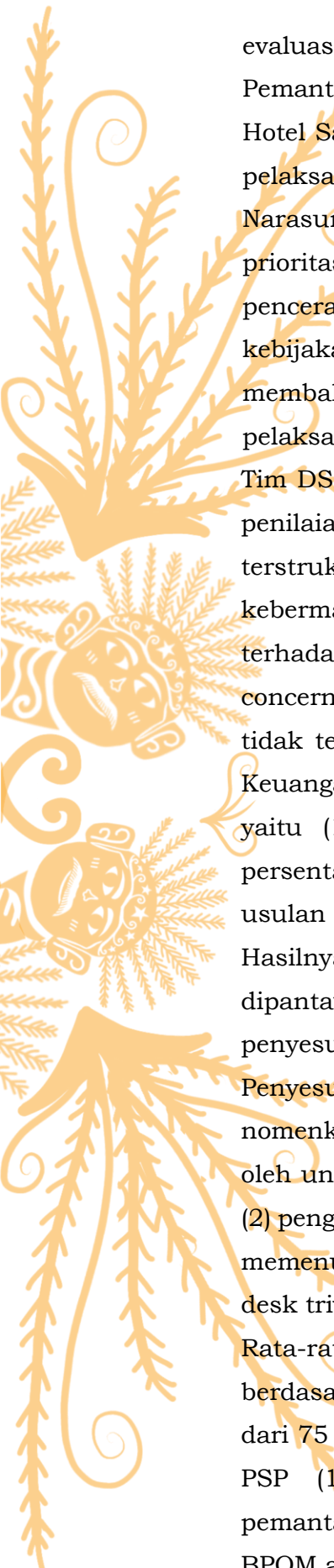
4. Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan

Pemantauan tindak lanjut arahan Kepala BPOM pada disposisi surat 'pantau' dan arahan lisan pada kegiatan strategis dilakukan melalui penelusuran ke anggota tim Pemantauan Implementasi Kebijakan Strategis Pimpinan (PIKSP) pada Kesekretariatan Pimpinan serta unit kerja dan pertemuan desk setiap triwulan. Sepanjang tahun 2023, dilakukan pemantauan tindak lanjut 107 disposisi surat dan 120 arahan lisan Kepala BPOM. Hasil pemantauan disampaikan kepada unit kerja terkait melalui 12 laporan pemantauan bulanan. Sebanyak 98,24% dari 227 arahan telah selesai ditindaklanjuti sedangkan sisanya dalam proses tindak lanjut oleh unit kerja. Ketertelusuran serta status penyelesaian tindak lanjut disposisi dan arahan lisan ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya 90,1%.



Gambar 3. 15 Workshop Evaluasi Pemantauan Kebijakan Strategis Pimpinan

Program Strategis Pimpinan (PSP) tahun 2023 didefinisikan sebagai program yang dinilai strategis oleh Satker pelaksana PSP dan perlu diketahui perkembangannya oleh pimpinan BPOM sehingga dilakukan pemantauan secara berkala. Untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi monitoring dan



evaluasi PSP yang efektif di BPOM, diselenggarakan Workshop Evaluasi Pemantauan Kebijakan Strategis Pimpinan pada Jumat, 24 Februari 2023 di Hotel Santika Mega city Bekasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemantauan kebijakan strategis pimpinan di BPOM. Narasumber dari KSP diundang untuk sharing tentang fungsi monev program prioritas ataupun program strategis Presiden sehingga dapat memberikan pencerahan dan inspirasi dalam peningkatan kualitas fungsi pemantauan kebijakan strategis pimpinan di BPOM, khususnya monev PSP. Desk ini juga membahas *assessment tools* usulan PSP tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan PSP tahun 2022.

Tim DSP mengembangkan *assessment tools* usulan PSP sebagai alat bantu penilaian dan pemilihan PSP dari usulan PSP unit kerja secara lebih terstruktur. Kriteria *assessment tools* usulan PSP meliputi kebermanfaatan/dampak bagi masyarakat/stakeholder, daya ungkit terhadap organisasi, cakupan program, isu terkini, concern pimpinan, concern masyarakat/stakeholder, dan new initiative. Selain itu, usulan PSP tidak termasuk dalam program yang dipantau oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. d. Evaluasi pelaksanaan PSP dilakukan berdasarkan dua kriteria, yaitu (1) perkembangan PSP dalam memenuhi target output dan (2) persentase realisasi PSP menurut self assessment unit kerja. Sebanyak 119 usulan PSP/Sub PSP dari 30 unit kerja direviu menggunakan tools ini. Hasilnya adalah 77 PSP/Sub PSP dari 27 unit kerja memenuhi kriteria untuk dipantau oleh Tim DSP tahun 2023. Pada triwulan I, terdapat beberapa penyesuaian PSP/Sub PSP sehingga diperoleh total 78 PSP/Sub PSP. Penyesuaian PSP/Sub PSP pada triwulan I terdiri dari (1) penggantian nomenklatur dan/atau perluasan jumlah Sub PSP dari suatu PSP, dilakukan oleh unit kerja terkait pada saat pemantauan PSP triwulan I berjalan; serta (2) penghapusan usulan PSP yang memerlukan perbaikan, namun tetap tidak memenuhi kriteria sebagai PSP, dilakukan oleh Tim DSP PusAKOM pada saat desk triwulan I.

Rata-rata perkembangan PSP secara keseluruhan hingga akhir tahun 2023 berdasarkan hasil *self assessment* unit kerja sebesar 96,8%. Sebanyak 64 dari 75 PSP/Sub PSP (85,3%) berjalan sesuai target sedangkan 11 PSP/Sub PSP (14,7%) belum mencapai target. Tiga PSP tidak dilanjutkan pemantauannya karena penanggung jawab PSP tersebut adalah eksternal BPOM atau di luar rentang kendali BPOM.



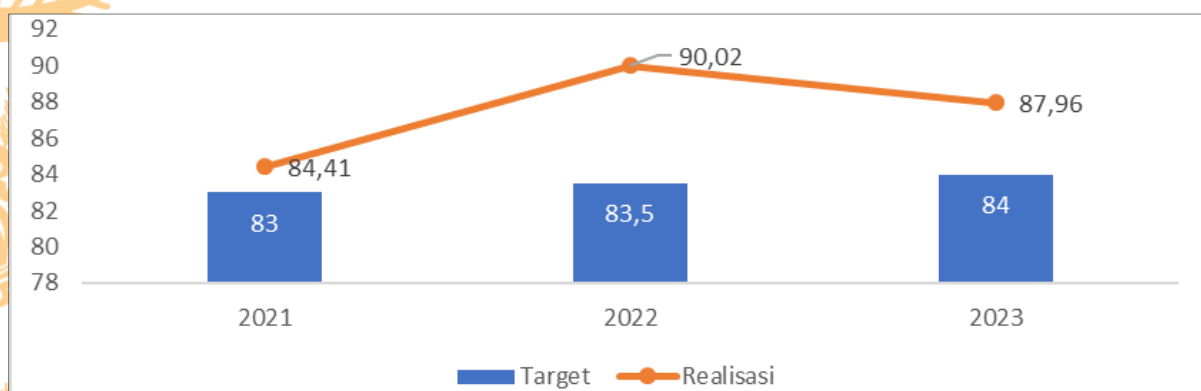
Gambar 3. 16 Desk Pemantauan Implementasi Kebijakan Strategis Pimpinan Triwulan I Tahun 2023

Selain benchmarking dengan Kantor Staf Presiden, tim Monev PSP juga melaksanakan benchmarking dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kegiatan ini dilaksanakan melalui Desk Pemantauan Implementasi Kebijakan Strategis Pimpinan Triwulan I Tahun 2023 tanggal 15-16 Mei 2023 di Hotel Santika Bekasi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi Dan Komunikasi Kemenko PMK yang berbagi tentang kriteria, mekanisme dan tata hubungan kerja, best practice, dan tantangan dalam pemantauan dan evaluasi tindak lanjut kebijakan/arahan/program strategis Pimpinan.

5. Survei Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan DSP

Survei untuk mengukur Indeks Kinerja Kegiatan (IKK) keberhasilan koordinasi dalam layanan DSP dilakukan triwulanan kepada unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait yang pernah berkoordinasi dan berinteraksi dengan Tim DSP pada kegiatan Kepala BPOM. Ruang lingkup survei adalah (1) koordinasi dalam ketersediaan bahan substansi sebelum kegiatan, (2) pendampingan/pengawasan bahan substansi pada saat pelaksanaan kegiatan, dan (3) penyampaian notula serta monitoring tindak lanjut arahan Kepala BPOM setelah pelaksanaan kegiatan. Responden survei adalah penanggung jawab atau narahubung yang berinteraksi dengan Tim DSP pada 81 kegiatan Kepala BPOM selama tahun 2023. Hasil survei secara

kumulatif tahun 2023 menunjukkan Indeks Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan DSP adalah 87,96 atau 104,71% dari target 84,00 (dari skala 100). Survei pengukuran Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan menggunakan ruang lingkup pernyataan yang sama sejak 2021. Sedangkan sebelum 2021, ruang lingkungannya berbeda. Perbandingan target dan realisasi indeks yang diperoleh dari tahun 2021-2023 seperti yang ada pada Gambar 3.17. menunjukkan bahwa terjadi kenaikan realisasi signifikan tahun 2022, sedangkan tahun 2023 terjadi penurunan. Namun demikian, perbedaan realisasi pada 2021-2023 menjadi dasar penetapan usulan target indeks keberhasilan koordinasi dalam layanan DSP tahun 2024 menjadi 89.



Gambar 3. 17 Indeks Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan Tahun 2021-2023

SK 6 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan yang Optimal

IKSK 6.1 : Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

1. Penguatan Organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Pada tahun 2022, Badan POM RI telah membentuk Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang merupakan transformasi dari Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan). Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM RI memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis, penyusunan rekomendasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pada bidang analisis kebijakan pengawasan obat dan makanan, serta fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, diperlukan Reformasi Birokrasi sebagai cara yang efektif dan efisien dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government*). Perubahan birokrasi ini sangat bergantung pada *mindset* dan *culture-set* Aparatur, sehingga dibutuhkan penguatan budaya kerja dan organisasi

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menyelenggarakan kegiatan “Penguatan Organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM RI” pada tanggal 19 - 21 Maret 2023 secara daring dan luring di Aula Fairfield by Marriott Hotel Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan tujuan menumbuhkan semangat menanamkan core value budaya kerja BerAKHLAK untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Core values BerAKHLAK yang dimaksud merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

IKSK 6.2 : Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

1. Evaluasi Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Evaluasi Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tidak hanya melihat dari hasil kegiatan namun evaluasi juga dilakukan dari mulai tahap perencanaan yang meliputi kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang juga dimonitoring secara berkala dan yang terakhir adalah hasil atau output dari kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

Evaluasi memberikan kemudahan untuk mengetahui apa saja yang kurang atau belum terlaksananya suatu tujuan. Disamping itu evaluasi memberitahukan apakah yang dilakukan mampu selesai pada waktunya dan apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan semestinya. sehingga berusaha menemukan faktor apa yg menyebabkan kendala tersebut dan berusaha untuk mencari solusi dari suatu masalah. Perbaiki usaha tanpa didahului

oleh kegiatan evaluasi itu tidak mungkin, sebab untuk melakukan perbaikan kita harus mengetahui apa yang harus diperbaiki dan mengapa harus ada perbaikan. Karena itu tanpa adanya evaluasi maka tidak akan ada yang namanya perubahan yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan merumuskan tindak lanjut yang akan dilakukan. Evaluasi kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan diselenggarakan secara luring dan daring pada tanggal 7 – 10 Juni 2023 di Hotel Niagara, Parapat yang diikuti oleh seluruh pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebanyak 55 orang, Loka POM Toba Samosir 2 orang dan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun 2 orang. Evaluasi Kinerja yang dilakukan adalah terkait kinerja tahun 2022 dan 2023 serta perencanaan kinerja tahun 2024.

Agenda Pertemuan meliputi:

- a) Sambutan dan arahan dari Plt. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;
- b) *Sharing session* peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- c) Rapat Evaluasi Kinerja Internal tahun 2022 - 2023 dan perencanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024.



Gambar 3. 18 Sharing Session dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun



Gambar 3. 19 Peserta Evaluasi Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

2. Monitoring dan Evaluasi Bulanan

Kegiatan untuk memantau dan memonitor pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan setiap bulan berupa kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan sebelum tanggal 10 setiap bulannya, sehingga apabila ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ataupun anggaran akan segera dicarikan solusinya.

Pada tahun 2023 telah dilakukan juga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. penyusunan Laporan Kinerja 2022 dan penyusunan Laporan Kinerja Interim setiap Triwulan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan juga penyusunan RKT dan PK tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja 2022. Penyusunan Laporan Kinerja interim setiap Triwulan.

SK 7 : Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal

IKSK 7 : Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

1. Jam Pelajaran (JP) Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pada Tahun 2023 seluruh pegawai di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal sebanyak 20 jam

pelajaran (JP). Kegiatan pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui *in-house training*, lembaga pelatihan dan melalui aplikasi IDEAS yang disediakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 3. 2 Pencaapaian jam pelajaran (JP) Tahun 2023

No	Nama	Jumlah JP
1	Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc.	197
2	Rina Puspitasari, STP, M.Sc	160
3	Dyah Larasinta, A.Md	159
4	Setyaningsih, SE	120
5	Eva Nikastri, STP, M.Si	108
6	Romanudin Nanang Mulyanto, S.E	107
7	Leni Ranty, S.Farm, Apt	104
8	Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI	95
9	Sri Astuti, S.Si., M.Si.	87
10	Ellen Simanjuntak, SE	87
11	Radi Riadi, S.Farm., Apt.	86
12	Laila Udhhiyyah, SE	81
13	Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek	72
14	Fairuz Murti, S.K.M	71
15	Tina Wikara, S.Si, M.Farm	71
16	Adinda, S.T	69
17	Fajri Nugroho, S.Farm, Apt	65
18	Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si	60
19	Dr. Rina Adriany, Apt, MSi	56
20	Dwi Ratnasari, S.Si	54
21	Renny Anggraeni, A.Md	51
22	Yosua Halasan P Panjaitan, S.Farm	51
23	Evi Ratna Sari, S.K.M	50

No	Nama	Jumlah JP
24	Isna Inawati Asih, S. Farm, Apt	49
25	Eka Pratiwi, S.Si, Apt	49
26	Elsadora Reapina Malthaputri, S.TP., M.A.B.	45
27	Rian Kurniawan, A.Md.	44
28	Kenya Lintang Wienantu, S.K.M	43
29	Sri Nurhayati, S.Si,Apt., M.M	41
30	Septia Chandra Kesi, S.Farm	41
31	Rotua Uli Carolina Simanjuntak, S.K.M	36
32	Grace Silvia Lumantow, S.Farm, Apt	34
33	Okki Ayu Oktria, S.Hub.Int	31
34	Dodo Saputra, S.Kom	30
35	Dyah Ayu Wulandari, S.Farm	29

2. Penilaian Kinerja Pegawai

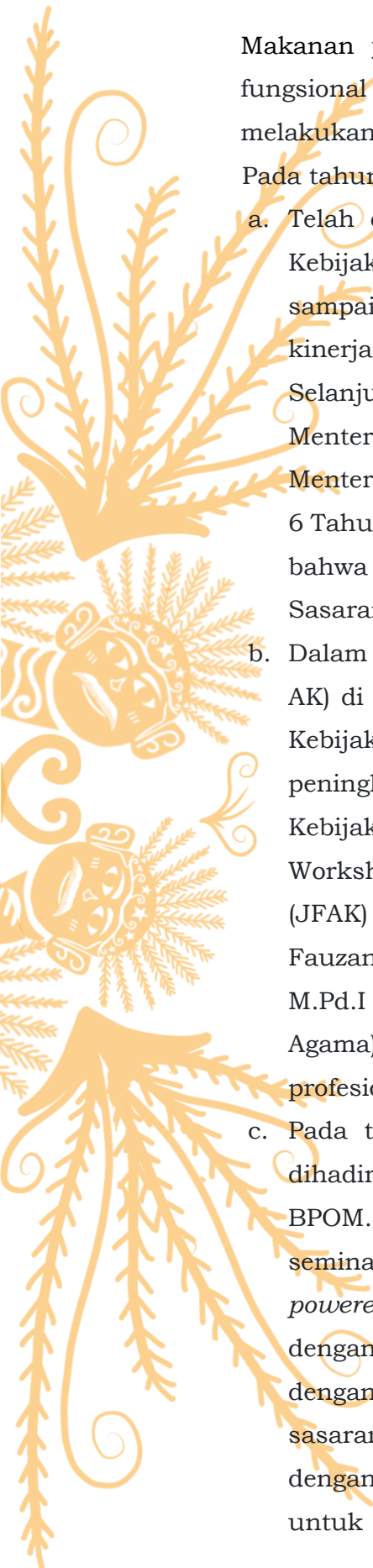
Tahun 2023 telah dilakukan penilaian SKP kepada seluruh pegawai di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebanyak 35 pegawai. Penilaian kinerja tahunan seluruh pegawai masuk dalam kategori “**Baik**”.

3. Pemantauan Pelanggaran Disiplin

Tahun 2023 telah dilakukan pemantauan terkait pelanggaran disiplin kepada seluruh pegawai di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Sepanjang tahun 2023 tidak ada pelanggaran disiplin yang ditemukan. Pelanggaran disiplin dilihat dari pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam mengikuti apel yang diselenggarakan setiap hari Senin pagi, Keterlambatan dan kedatangan jam kerja.

4. Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.11.20.1088 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Tim Penilai Jabatan Fungsional Lainnya dan Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2023 Dalam rangka membangun jenjang karir pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan



Makanan yang ditunjuk sebagai unit kerja pembina kelompok jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan BPOM memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan penilaian jabatan fungsional analis kebijakan

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebanyak 32 usulan. Penilaian kinerja sampai periode tersebut merupakan penilaian terakhir. Selanjutnya penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara bahwa Penilaian Angka Kredit sudah terintegrasi dengan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- b. Dalam rangka pembinaan teknis Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan selaku unit pembina JFAK melaksanakan peningkatan kompetensi berupa workshop Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada tanggal 3 - 4 Maret 2023 di Hotel Margo, Depok. Workshop dihadiri oleh seluruh Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) di lingkungan BPOM dengan mengundang narasumber Drs. Haris Fauzan, M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Utama – LAN) dan Dr. Ridwan, M.Pd.I (Analis Kebijakan Ahli Madya – Sekretaris TPI AK Kementerian Agama). Tujuan workshop adalah menciptakan Analis Kebijakan yang profesional dan tangguh.
- c. Pada tanggal 7 Desember 2023 bertempat di Hotel Avenzel, Bekasi dihadiri oleh seluruh Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan di lingkungan BPOM. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menyelenggarakan seminar dengan mengambil tema “Mengenal ChatGPT sebagai *AI-powered tool* dan Potensi Pemanfaatannya dalam Pengelolaan Informasi” dengan narasumber Dr. Marcelino R Pandin. Seminar ini dirangkai dengan diskusi untuk menyusun rencana program pembinaan yang tepat sasaran bagi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) di BPOM dengan tujuan membuka wawasan peserta, dan dapat menginspirasi untuk merumuskan program pengembangan kompetensi yang dapat

mendorong terwujudnya JFAK yang lincah, professional, handal, dan berkualitas.



Gambar 3. 20 Seminar ChatGPT sebagai salah satu peningkatan kompetensi JFAK

Tabel 3. 3 Persebaran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Biro Hukum dan Organisas	11
2	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	6
3	Biro Perencanaandan Keuangan	7
4.	Biro Umum	1
5	Pusat Pengembangan Suber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	1
6	Direktorat Siber Obat dan Makanan	4
7	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	1
8	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	1
9	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	17
10	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	1

11	Direktorat Cegah Tangkal	3
Total		53

Tabel 3. 4 Sebaran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan berdasarkan Jenjang

No	Jenjang Jabatan	Jumlah
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	36
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya	7
Total		53

5. Pemeriksaan Kesehatan

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai unit pendukung di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara kontinu setiap tahun melakukan *medical check-up* untuk memeriksakan kesehatannya secara menyeluruh. Tahun 2023 pemeriksaan dilaksanakan di RS Gatot Subroto, Jakarta, pengadaannya dilakukan secara swakelola Tipe 2 dan pelaksanaan kegiatan pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 diikuti 47 orang pegawai yang terdiri dari 32 orang PNS dan 15 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

SK 8 : Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

IKSK 8 : Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal

1. Pengadaan Alat Pengolah Data

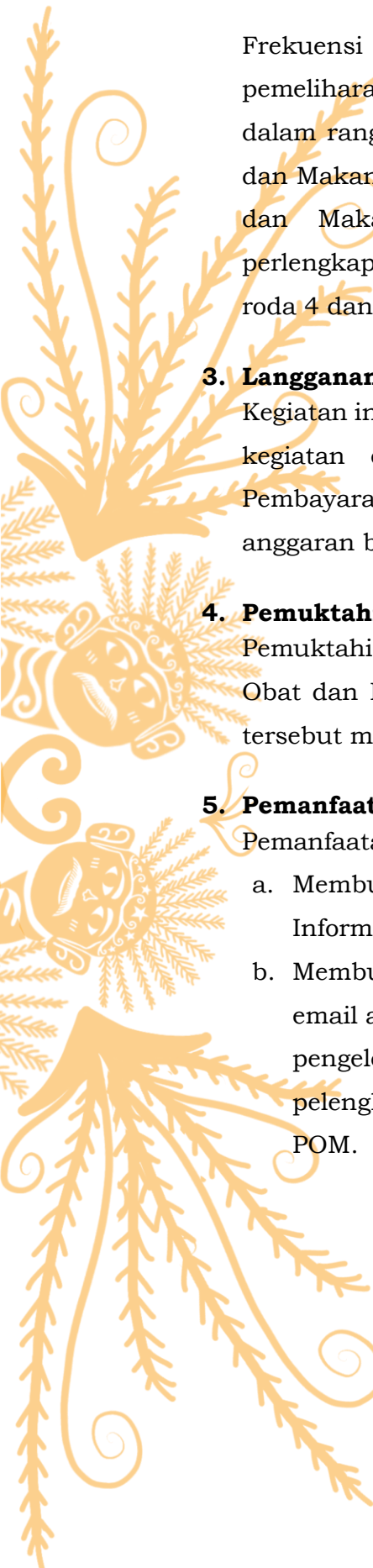
Sarana penunjang sangat diperlukan dalam menunjang terlaksananya kegiatan Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan. Seiring dengan bertambahnya pegawai dan semakin berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang menuntut semua dibuat /diolah secara online menuntut perkembangan teknologi IT dan hal itu akan membuat komputer/laptop dengan teknologi lama akan semakin ketinggalan dengan ditandai semakin menurunnya performa laptop yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mengadakan Alat Pengolah Data pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Daftar Pengadaan Alat Pengolahan Data Tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah	Penempatan
1	Scanner	2	Ruang Staf
2	Printer Warna	1	Ruang Staf
3	Printer Portable	2	Ruang Staf
4	Laptop	12	Ruang Staf
5	Personal Computer/all in one	1	Ruang Staf

2. Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Sarana prasarana dalam menunjang kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi karena akan berdampak pada peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor selanjutnya memerlukan kerja sama dengan mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, sehingga pegawai merasa puas dan nyaman yang dapat meningkatkan kinerja dan kesuksesan Badan POM. Salah satu aspek pengelolaan sarana dan prasarana adalah melakukan perawatan atau pemeliharaan.



Frekuensi pemakaian yang terus menerus menyebabkan perlu adanya pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga performa kinerja pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Berkaitan dengan hal tersebut Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melaksanakan pemeliharaan peralatan perkantoran/ perlengkapan kantor seperti printer, scanner, Mesin Fotocopy, Kendaraan roda 4 dan Kendaraan roda 2.

3. Langganan Daya dan Jasa

Kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan akan telepon untuk seluruh kegiatan operasional Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Pembayaran biaya langganan telepon dilakukan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan.

4. Pemuktahiran Data

Pemuktahiran data yg terdapat di dashboard unit Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan dashboard tersebut minimal dilakukan sebulan sekali

5. Pemanfaatan Sistem

Pemanfaatan Sistem Informasi terdiri dari :

- a. Membuka dashboard BOC yang dilakukan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi yang dilakukan paling sedikit 4 kali dalam sebulan.
- b. Membuka email untuk semua pegawai dan email unit sebulan sekali Data email aktif dan tidak aktif ini berguna sebagai data bukti capaian indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal, serta alat monitoring pelengkap terhadap capaian aspek pemanfaatan corporate email Badan POM.

SK 9 : Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel

IKSK 9 : Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, diperlukan dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk kelancaran pelaksanaan tugas ASN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja bagi ASN dalam pelaksanaan tugas. Tahun 2023 Gaji dan Tunjangan dianggarkan pada DIPA Satker Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah untuk 33 pegawai. Dalam hal pelaksanaan pelayanan gaji kepada pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara rutin dilakukan setiap bulannya.

2. Operasional Perkantoran

PPNPN dan pengelola kegiatan diperlukan dalam membantu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, baik di bidang teknis maupun dukungan manajemen. Jumlah PPNPN pada tahun 2023 sebanyak 18 orang. Pengelola Kegiatan Satuan Kerja terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Pejabat Pembuat Komitmen 2 orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang, Staf Pengelola Kegiatan 2 orang. Pengelola Sistem Akuntansi di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terdiri dari Penanggung jawab UAKPA 1 orang, Koordinator UAKPA/UAKPB 1 orang, Petugas SAKPA 1 orang dan Petugas BMN 1 orang.

SK 10 : Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Di Unit Pusat Analisis dan Kajian Obat Dan Makanan

IKSK 10 : Nilai Pengelolaan Kearsipan di Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendiseminasikan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan, dilakukan pembinaan kearsipan dengan salah satu kegiatannya adalah pengawasan Kearsipan.

Pengawasan kearsipan bertujuan untuk melalui sejauh mana kepatuhan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam memenuhi prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Ruang lingkup pengawasan meliputi aspek pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan. Kemudian ada aspek sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana. Pengawasan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dilaksanakan pada 03 April 2023, dengan Tim Pengawas Kearsipan Internal yang diketuai oleh Rina Rosalina, SE dengan anggota Vira Lyana, A.Md dan Syaiful Ramadhan, A.Md.

Berdasarkan pengawasan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar **94,26** (Sembilan puluh empat koma dua puluh enam) dengan kategori **“AA”** atau **“Sangat Memuaskan”**. Namun demikian, masih ada beberapa kinerja yang harus ditingkatkan, yaitu pemberkasan arsip aktif, penyusunan daftar arsip vital dan pelaporan daftar arsip ke unit kearsipan I secara rutin dan konsisten.

SK 11 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan

IKSK 11 : Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa di Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan suatu sistem pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/ jasa agar lebih terintegrasi. Sesuai Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021 menjadi acuan bagi K/L/Pemda dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya pemenuhan indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa setiap satker diukur dengan parameter sebagai berikut:

- 1) Sirup – Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Bobot 20%);
Indikator keberhasilan dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ.
- 2) *E-Tendering* (Bobot 20%);
Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan untuk e-Tendering yang diumumkan oleh PPK di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.
- 3) *E-Purchasing* (Bobot 20%)
Indeks Pemanfaatan e-Purchasing yang diumumkan oleh PPK berdasarkan pagu pengadaan E- Purchasing dalam aplikasi SiRUP.
- 4) *Non e-Tendering* dan *Non e-Purchasing* (Bobot 20%);
Indeks Pemanfaatan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E- Purchasing pada aplikasi SiRUP.
- 5) *e-Kontrak* (Bobot 20 %)
Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

Dari hasil penilaian Biro Umum **tingkat kepatuhan dalam Pemanfaatan Sistem Pengadaan (IPS) Satuan Kerja PUsat Analisis Kebijakan Obat dan**

Makanan dengan kategori “Sangat Baik” dengan rincian penilaian sebagai pada tabel 8.:

Tabel 3. 6 Tingkat Kepatuhan Dalam Pemanfaatan Sistem Pengadaan (IPS)

No	Nama Barang	Jumlah
1	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	20
2	E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat)	20
3	E-Purchasing	15
4	Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan	15
5	E-Kontrak	20
Total		90 (Sangat Baik)

SK 12 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan BMN di unit Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan

IKSK 12 : Nilai Pengelolaan BMN di Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Biro Umum Bidang Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan BMN yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Badan POM antara lain satuan kerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan nilai parameter sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN: 27,88 (Dua puluh tujuh koma delapan puluh delapan) Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah

- membuat laporan BMN yang terdiri dari: Laporan BMN Tahunan 2022, Laporan BMN Tahun 2022 Audited dan Laporan BMN Semester I Tahun 2023
2. Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RKBMN: 2,50 (Dua koma lima puluh)
 3. Jumlah Penetapan Status Pengguna (PSP) BMN dibandingkan total aset: 13.79 (Tiga belas koma tujuh puluh sembilan). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, dengan ini Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mengusulkan permohonan penetapan status penggunaan berupa peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, *software* dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Daftar PSP BMN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023

No	Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah Unit
1	Dispenser	Polytron	1
2	Bracket Standing Peralatan	NORTH BAYOU Bracket Standing TV for 55 - 80 inch AVA1800-70-1P	1
3	Camera Digital	Sony	1
4	Refrigerator	Polytron	1
5	Software Komputer	Aplikasi Survei Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan	1
Total			5

4. Jumlah Penghapusan BMN Rusak Berat dibandingkan Total Aset Rusak Berat: 20.00 (Dua puluh) Pada tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan penghapusan BMN yang mengalami Rusak Berat dan melaksanakan penjualan yang diajukan melalui ke KPKNL Jakarta IV dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Daftar Penghapusan BMN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023

No.	Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah Unit
1	P.C Unit	Lenovo	1
2	P.C Unit	HP Pavillion Slimelin 5389D	3
3	P.C Unit	DELL Optiplex (TM) 390SF	5
4	Printer	-	7
5	A.C. Split	AC 2 PK	1
6	Monografi	-	30
7	Buku Lainnya	-	14
8	Modem	USB,HuaWei E220	1
9	Scanner	Canon/Type.CS 5600 F	1
10	Server	IBM	1
11	Facsimile	SHARP/Type. FO- 77	1
Total			65

5. Jumlah Pemusnahan Persediaan usang/rusak dibandingkan Total Persediaan Usang/Rusak: 20.00 (Dua puluh)

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar **84.16** (Delapan puluh empat koma enam belas) dengan grade penilaian "**Sangat Baik**".



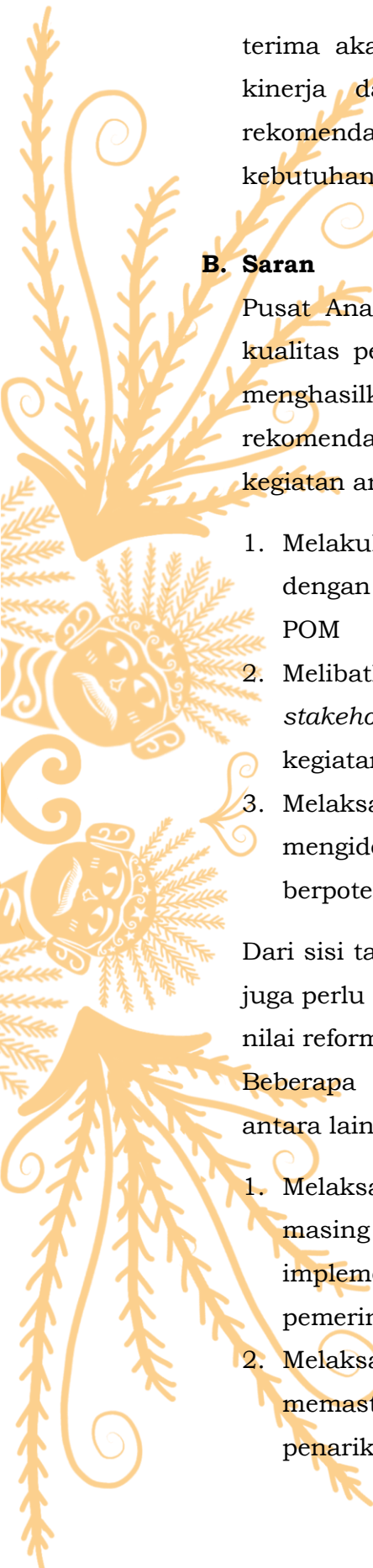
BAB IV

A. Kesimpulan

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai unit kerja tingkat II di Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 memperoleh mandat untuk melaksanakan analisis kebijakan dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam menjalankan mandat tersebut Pusat Analisis Kebijakan memiliki 9 sasaran kinerja yang diukur pencapaiannya melalui 11 indikator kinerja. Dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melaksanakan berbagai kegiatan baik kegiatan inti yaitu perencanaan kebutuhan topik analisis kebijakan, pelaksanaan analisis kebijakan Obat dan Makanan, dan publikasi/diseminasi hasil analisis kebijakan, maupun kegiatan pendukung seperti pengembangan kompetensi pegawai dan jabatan fungsional analisis kebijakan, penerapan sistem mutu, reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah, pengadaan belanja modal alat pengolah data dan fasilitas perkantoran serta pemeliharaan dan operasional perkantoran.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, seluruh kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pencapaian 11 indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan seluruhnya dapat terlaksana dan selesai dengan baik. Dari sisi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga telah memperoleh serapan anggaran yang optimal diatas 99%, tepatnya sebesar Rp. 24.015.115.324 dari PAGU Rp.24.163.177.000 atau senilai 99,39%. Meskipun seluruh kegiatan dan anggaran telah terlaksana secara optimal, namun berdasarkan laporan kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan masih terdapat 2 indikator kinerja yang belum dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja bagi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk dapat berinovasi guna mempertajam fokus kegiatan yang dilaksanakan guna mendorong pencapaian seluruh sasaran dan indikator kinerja unit organisasi.

Kami melalui Laporan Tahunan ini juga mengharapkan kritik dan masukan yang membangun dari seluruh *stakeholder*. Kritik dan masukan yang kami



terima akan menjadi dasar bagi kami untuk dapat terus meningkatkan kinerja dan memenuhi ekspektasi *stakeholder* guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tajam, akurat, dan relevan dengan kebutuhan Badan Pengawas Obat dan Makanan.


B. Saran

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan harus terus meningkatkan kualitas pelaksanaan analisis kebijakan Obat dan Makanan untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan guna memperbaiki pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan antara lain:

1. Melakukan penyusunan dan identifikasi kebutuhan analisis kebijakan dengan melibatkan seluruh pimpinan tinggi madya dan Kepala Badan POM
2. Melibatkan *stakeholder* internal (unit kerja internal BPOM) dan *stakeholder* eksternal (KL/Perguruan tinggi/Ahli) dalam pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan
3. Melaksanakan diseminasi hasil analisis kebijakan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi seluruh *stakeholder* yang akan memanfaatkan atau berpotensi memanfaatkan.

Dari sisi tata kelola organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga perlu meningkatkan manajemen organisasi khususnya pada penerapan nilai reformasi birokrasi dan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan. Beberapa rekomendasi peningkatan tata kelola untuk dapat diterapkan antara lain:

1. Melaksanakan inovasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing pokja area perubahan melalui pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi reformasi birokrasi maupun inovasi sistem pelaksanaan pemerintah yang lebih efektif dan efisien
2. Melaksanakan pengadministrasian keuangan secara teliti dan memastikan pelaksanaan anggaran yang memperhatikan rencana penarikan dana.

- 
3. Melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk dapat menghasilkan output yang lebih optimal dengan anggaran yang tersedia.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel daftar Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

No	Judul	Tempat	Waktu	Peserta	Jenis Kegiatan
1	Pelatihan Analisis Kebijakan Publik dan Bimtek Penulisan Laporan Kebijakan (PolicyPaper) (Inhouse Training)				<i>In-house Training</i>
2	(e-learning) Kompetensi Umum Dasar Pengawasan Obat dan Makanan		29 September 2023	Leni Ranty, S.Farm, Apt, Kenya Lintang Wienantu, S.K.M	Bimbingan Teknis / Penataran
3	Advokasi dan Sosialisasi Peraturan di Bidang Standar Pangan	hybrid (daring dan luring)	30 Januari 2023	Dr. Rina Adriany, Apt, MSi	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
4	Assertive Communication barriers and How to Become Over		13 Maret 2023	Rina Puspitasari, STP, M.Sc	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
5	Bimbingan Teknis ISO 37001 : 2016		21 Desember 2023	Tina Wikara, S.Si, M.Farm, Radi Riadi, S.Farm., Apt., Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc.	Bimbingan Teknis / Penataran
6	Bimbingan Teknis Awarness QMS ISO 9001:2015	The Margo Hotel, Depok	03 Mei 2023	Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek	Bimbingan Teknis / Penataran
7	Bimbingan Teknis E-Filling Aplikasi E-LHKPN di Lingkungan BPOM	Zoom Meeting	01 Februari 2023	Eva Nikastri, STP, M.Si, Leni Ranty, S.Farm, Apt, Septia Chandra Kesi, S.Farm, Evi Ratna Sari, S.K.M	Bimbingan Teknis / Penataran

8	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Perencana	Bekasi, Jawa Barat	24 Mei 2023	Romanudin Nanang Muliyanto, S.E	Bimbingan Teknis / Penataran
9	Bimbingan Teknis Kearsipan	Hotel Atria Gading Serpong Tangerang	08 November 2023	Dyah Larasinta, A.Md	Bimbingan Teknis / Penataran
10	Bimbingan Teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara		15 Juni 2023	Adinda, S.T	Bimbingan Teknis / Penataran
11	Bimbingan Teknis Manajemen Kinerja Pegawai	Bekasi	27 November 2023	Eva Nikastri, STP, M.Si, Dyah Larasinta, A.Md, Evi Ratna Sari, S.K.M, Ellen Simanjuntak, SE, Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek, Dwi Ratnasari, S.Si, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc., Setyaningsih, SE	Bimbingan Teknis / Penataran
12	Bimbingan Teknis Master of Ceremony	Depok	11 Desember 2023	Fairuz Murti, S.K.M	Bimbingan Teknis / Penataran
13	Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Padma Resort Legian, Bali	31 Maret 2023	Isna Inawati Asih, S. Farm, Apt, Eva Nikastri, STP, M.Si, Eka Pratiwi, S.Si, Apt, Grace Silvia Lumantow, S.Farm, Apt, Sri Astuti, S.Si., M.Si., Adinda, S.T, Leni Ranty, S.Farm,	Bimbingan Teknis / Penataran

			<p>Apt, Dr. Rina Adriany, Apt, MSi, Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Rian Kurniawan, A.Md., Renny Anggraeni, A.Md, Dyah Larasinta, A.Md, Fairuz Murti, S.K.M, Okki Ayu Oktria, S.Hub.Int, Sri Nurhayati, S.Si,Apt., M.M, Septia Chandra Kesi, S.Farm, Evi Ratna Sari, S.K.M, Fajri Nugroho, S.Farm, Apt, Elsadora Reapina Malthaputri, S.TP., M.A.B., Ellen Simanjuntak, SE, Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek, Dwi Ratnasari, S.Si, Tina Wikara, S.Si, M.Farm, Yosua Halasan P Panjaitan, S.Farm, Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si, Radi Riadi, S.Farm., Apt., Rotua Uli Carolina Simanjuntak, S.K.M, Khusnul Khotimah,</p>	
--	--	--	--	--

				S.Si., M.Sc., Kenya Lintang Wienantu, S.K.M, Rina Puspitasari, STP, M.Sc, Laila Udhhiyyah, SE, Setyaningsih, SE, Romanudin Nanang Muliyanto, S.E	
14	Bimbingan Teknis Online : Coaching dan Mentoring		04 Januari 2023	Tina Wikara, S.Si, M.Farm	Bimbingan Teknis / Penataran
15	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik	The Margo Hotel, Depok	29 Maret 2023	Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek, Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek, Setyaningsih, SE,	Bimbingan Teknis / Penataran
16	Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Zoom Meeting	19 September 2023	Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc.	Bimbingan Teknis / Penataran
17	Bimbingan Teknis Pengawasan dan pengendalian BMN	Gran Melia Jakarta	17 Januari 2023	Rian Kurniawan, A.Md., Setyaningsih, SE	Bimbingan Teknis / Penataran
18	Bimbingan Teknis Pengujian Mikrobiologi	Balai Besar POM di Pontianak	23 Mei 2023	Adinda, S.T	Bimbingan Teknis / Penataran
19	Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PFM	Bandung	03 Agustus 2023	Setyaningsih, SE	Bimbingan Teknis / Penataran

20	Bimbingan Teknis Penilaian Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan		21 September 2023	Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Bimbingan Teknis / Penataran
21	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Daring	04 Januari 2023	Isna Inawati Asih, S. Farm, Apt, Leni Ranty, S.Farm, Apt, Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Rina Puspitasari, STP, M.Sc	Bimbingan Teknis / Penataran
22	Bimbingan Teknis Penyusunan dokumen pelaporan Kinerja	Harris Hotel and Convention, Bekasi	08 Februari 2023	Sri Astuti, S.Si., M.Si., Adinda, S.T, Sri Nurhayati, S.Si,Apt., M.M, Tina Wikara, S.Si, M.Farm, Romanudin Nanang Muliyanto, S.E	Bimbingan Teknis / Penataran
23	Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Hybrid ; Hotel Aston Kemayoran ; Hotel Grand Mercure Kemayoran ; Zoom Meeting	13 Januari 2023	Dr. Rina Adriany, Apt, MSi, Ellen Simanjuntak, SE, Kenya Lintang Wienantu, S.K.M, Rina Puspitasari, STP, M.Sc, Romanudin Nanang Muliyanto, S.E	Bimbingan Teknis / Penataran
24	Bimbingan Teknis Quality Audit ISO 9001:2015	The Grand Mansion Menteng	21 Maret 2023	Sri Astuti, S.Si., M.Si., Tina Wikara, S.Si, M.Farm, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc.	Bimbingan Teknis / Penataran
25	Bimbingan Teknis Registrasi Pangan Olahan		21 September 2023	Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si	Bimbingan Teknis / Penataran

26	Bimbingan Teknis SAKIP dan Monev Online	Cibubur, Jawa Barat	22 Mei 2023	Romanudin Nanang Muliyanto, S.E	Bimbingan Teknis / Penataran
27	Bimbingan Teknis SPIP	Biro Hukum dan Organisasi	22 Mei 2023	Sri Astuti, S.Si., M.Si., Rotua Uli Carolina Simanjuntak, S.K.M, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc.	Bimbingan Teknis / Penataran
28	Bimtek Analisis Gender	Hotel Grand Mansion, Jakarta	06 Juli 2023	Isna Inawati Asih, S. Farm, Apt, Evi Ratna Sari, S.K.M, Romanudin Nanang Muliyanto, S.E	Bimbingan Teknis / Penataran
29	Capacity Building Agent of Change BPOM	Bogor	29 Mei 2023	Dyah Larasinta, A.Md	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural
30	Diklat Kebijakan Publik	zoom	20 Maret 2023	Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc., Rina Puspitasari, STP, M.Sc	Pelatihan Teknis
31	Diseminasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pengawasan Obat dan Makanan		08 September 2023	Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
32	E-Learning Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik di Industri Rumah Tanggal Pangan (CPPB-IRTP)		29 November 2023	Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Pelatihan Teknis
33	E-Learning Critical Thinking		11 Oktober 2023	Dyah Ayu Wulandari, S.Farm	Bimbingan Teknis / Penataran

34	E-Learning Dasar-Dasar Penilaian Obat dan Makanan		29 September 2023	Leni Ranty, S.Farm, Apt	Bimbingan Teknis / Penataran
35	E-Learning Food Inspector Dasar		15 September 2023	Radi Riadi, S.Farm., Apt., Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Pelatihan Teknis
36	E-Learning Kerjasama Tingkat Dasar		29 September 2023	Leni Ranty, S.Farm, Apt	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural
37	E-Learning Manajemen Risiko		29 November 2023	Isna Inawati Asih, S. Farm, Apt, Eka Pratiwi, S.Si, Apt, Grace Silvia Lumantow, S.Farm, Apt, Dodo Saputra, S.Kom, Dr. Rina Adriany, Apt, MSi, Rian Kurniawan, A.Md., Renny Anggraeni, A.Md, Dyah Larasinta, A.Md, Okki Ayu Oktria, S.Hub.Int, Sri Nurhayati, S.Si,Apt., M.M, Septia Chandra Kesi, S.Farm, Evi Ratna Sari, S.K.M, Fajri Nugroho, S.Farm, Apt, Elsadora Reapina Malthaputri, S.TP., M.A.B., Ellen Simanjuntak, SE, Novi Pusparini, S.Farm,	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural

				Apt.,M.Biotek, Dwi Ratnasari, S.Si, Yosua Halasan P Panjaitan, S.Farm, Radi Riadi, S.Farm., Apt., Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc., Rina Puspitasari, STP, M.Sc, Laila Udhhiyyah, SE, Dyah Ayu Wulandari, S.Farm, Setyaningsih, SE, Romanudin Nanang Mulyanto, S.E	
38	E-Learning melaksanakan Pengambilan Contoh		29 November 2023	Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Pelatihan Teknis
39	E-Learning Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	E Learning	08 Mei 2023	Laila Udhhiyyah, SE	Pelatihan Teknis
40	E-Learning Pengawasan Farmakovigilans		27 April 2023	Tina Wikara, S.Si, M.Farm, Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si, Radi Riadi, S.Farm., Apt., Rotua Uli Carolina Simanjuntak, S.K.M, Kenya Lintang Wienantu, S.K.M	Pelatihan Teknis
41	E-Learning Sampling Obat dan Makanan		22 Januari 2023	Tina Wikara, S.Si, M.Farm, Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si, Radi Riadi, S.Farm., Apt.,	Pelatihan Teknis

				Kenya Lintang Wienantu, S.K.M	
42	E-learning Tingkat Dasar Jabatan Fungsional PFM		29 September 2023	Leni Ranty, S.Farm, Apt, Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Pelatihan Fungsional
43	Gratifikasi	Online	27 Juli 2023	Leni Ranty, S.Farm, Apt	Pelatihan Teknis
44	Internalisasi Keputusan Kepala BPOM	Jakarta	28 Agustus 2023	Sri Nurhayati, S.Si,Apt., M.M, Tina Wikara, S.Si, M.Farm	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
45	Manajemen Konflik antar generasi di tempat kerja		08 Agustus 2023	Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
46	Manajemen Resiko Series	Online Meeting	16 Juni 2023	Eva Nikastri, STP, M.Si, Grace Silvia Lumantow, S.Farm, Apt	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
47	Orientasi PPPK BPOM	Offline Lantai 6 Gedung Batik BPOM dan Online Zoom meeting	20 November 2023	Dodo Saputra, S.Kom, Dyah Ayu Wulandari, S.Farm	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural
48	Pelatihan A Great Fasilitator	Hotel Santika, Bekasi	28 November 2023	Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI	Pelatihan Teknis
49	Pelatihan Bahasa Inggris	Online	29 Juli 2023	Leni Ranty, S.Farm, Apt	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural

50	Pelatihan Food Inspector Tingkat Muda		03 Januari 2023	Elsadora Reapina Malthaputri, S.TP., M.A.B., Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Pelatihan Teknis
51	Pelatihan Manajemen Keuangan Negara	E Learning	10 Maret 2023	Laila Udhhiyyah, SE	Pelatihan Teknis
52	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar		13 Maret 2023	Isna Inawati Asih, S. Farm, Apt, Eka Pratiwi, S.Si, Apt	Pelatihan Manajerial dan Sosial Kultural
53	Pelatihan Pengawasan Iklan dan Penandaan Rokok dan Obat		19 September 2023	Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Pelatihan Teknis
54	Pelatihan Petugas Haji BPOM	Luring : HARRIS Hotel & Conventions Bekasi dan Leisure Inn Arion Hotel Jakarta	29 Mei 2023	Eva Nikastri, STP, M.Si	Pelatihan Teknis
55	Pelatihan Sampling Obat dan Makanan		12 Januari 2023	Sri Nurhayati, S.Si,Apt., M.M	Pelatihan Teknis
56	Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif	Hotel Harris Vertu (Luring) dan Daring melalui Zoom Meeting	26 Januari 2023	Dyah Larasinta, A.Md	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
57	Pengembangan Kompetensi Online		19 Juni 2023	Adinda, S.T	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi

58	Pengisian Jabatan PNS melalui Seleksi Terbatas di Lingkungan Badan POM	Bekasi	04 September 2023	Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
59	Peningkatan Pemahaman Mengenai Kebijakan Pro Bisnis dan HAM (BHAM) dalam Pengawasan Obat dan Makanan	Jakarta	23 Oktober 2023	Eva Nikastri, STP, M.Si, Dr. Rina Adriany, Apt, MSi, Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Renny Anggraeni, A.Md, Dyah Larasinta, A.Md, Fairuz Murti, S.K.M, Evi Ratna Sari, S.K.M, Fajri Nugroho, S.Farm, Apt, Fajri Nugroho, S.Farm, Apt, Elsadora Reapina Malthaputri, S.TP., M.A.B., Elsadora Reapina Malthaputri, S.TP., M.A.B., Elsadora Reapina Malthaputri, S.TP., M.A.B., Elsadora Reapina Malthaputri, S.TP., M.A.B., Ellen Simanjuntak, SE, Tina Wikara, S.Si, M.Farm, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc., Kenya Lintang Wienantu, S.K.M, Rina Puspitasari,	Workshop / Loka Karya

				STP, M.Sc, Laila Udhhiyyah, SE.	
60	Psikoedukasi	Online Meeting	22 Februari 2023	Eva Nikastri, STP, M.Si, Adinda, S.T, Septia Chandra Kesi, S.Farm, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc.	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
61	Seminar keberagaman inovasi dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	Harris Convention Hall Summarecon Bekasi	10 April 2023	Eva Nikastri, STP, M.Si, Sri Astuti, S.Si., M.Si., Dr. Rina Adriany, Apt, MSi, Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Rian Kurniawan, A.Md., Fajri Nugroho, S.Farm, Apt, Tina Wikara, S.Si, M.Farm, Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc., Setyaningsih, SE	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
62	Seminar Kepemimpinan		07 Agustus 2023	Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
63	Seminar Keterbukaan Informasi Publik	Auditorium Gedung Merah Putih Lantai 8 BPOM	12 April 2023	Ellen Simanjuntak, SE, Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek, Dwi Ratnasari, S.Si, Rotua Uli Carolina Simanjuntak, S.K.M, Setyaningsih, SE	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi

64	Seminar Laboratorium		15 Juni 2023	Adinda, S.T, Sri Nurhayati, S.Si,Apt., M.M, Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
65	Seminar Nasional Akselerasi Inovasi di Tingkat Desa dalam Rangka Mewujudkan Desa Inovatif di Indonesia	Daring	30 Mei 2023	Eka Pratiwi, S.Si, Apt	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
66	Seminar Pengendalian Produksi Berbasis Risiko	Prama Sanur Beach Hotel	02 November 2023	Leni Ranty, S.Farm, Apt	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
67	Seminar Psikologi dalam Pekerjaan (Psychology for Non Psychologist)		09 Maret 2023	Rina Puspitasari, STP, M.Sc	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
68	Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar BPOM	Zoom meeting	03 November 2023	Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
69	Sosialisasi Implementasi Kebijakan	Zoom meeting	03 November 2023	Eka Pratiwi, S.Si, Apt, Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Fairuz Murti, S.K.M, Fajri Nugroho, S.Farm, Apt, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc., Dyah Ayu Wulandari, S.Farm	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
70	Sosialisasi Beasiswa Dalam dan Luar Negri	Hybrid (Luring dan Daring)	21 Juli 2023	Leni Ranty, S.Farm, Apt, Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Septia Chandra Kesi, S.Farm, Yosua	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi

				Halasan P Panjaitan, S.Farm, Romanudin Nanang Mulyanto, S.E	
71	Sosialisasi dan Diskusi Regulatory Science		15 Juni 2023	Adinda, S.T, Leni Ranty, S.Farm, Apt, Rina Puspitasari, STP, M.Sc	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
72	Sosialisasi dan Diskusi Studi di Luar Negeri		20 Juni 2023	Adinda, S.T	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
73	Sosialisasi dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK		30 November 2023	Fajri Nugroho, S.Farm, Apt, Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc.	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
74	Sosialisasi dan Internalisasi Employeer Branding dan Core Value BerAKHLAK tingkat Dasar		04 September 2023	Isna Inawati Asih, S. Farm, Apt	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
75	Sosialisasi di Bidang Teknologi dan Informasi	Zoom Meeting/ Daring	28 Februari 2023	Rian Kurniawan, A.Md.	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
76	Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pengendalian Intern Pengelolaan BMN	The Stones Denpasar Bali	23 Mei 2023	Eva Nikastri, STP, M.Si, Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
77	Sosialisasi Pedoman Pemeriksaan Obat dan Makanan		09 November 2023	Sri Astuti, S.Si., M.Si., Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si, Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi

78	Sosialisasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas	Hotel Margo Depok	06 Maret 2023	Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Dyah Larasinta, A.Md, Evi Ratna Sari, S.K.M, Tina Wikara, S.Si, M.Farm, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc., Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc.	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
79	Sosialisasi penguatan SPIP		28 Februari 2023	Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
80	Sosialisasi Reformasi Birokrasi	Gedung Merah Putih	17 November 2023	Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Elsadora Reapina Malthaputri, S.TP., M.A.B., Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si, Kenya Lintang Wienantu, S.K.M	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
81	Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja PNS	Online Meeting	13 Februari 2023	Isna Inawati Asih, S. Farm, Apt, Eka Pratiwi, S.Si, Apt, Leni Ranty, S.Farm, Apt, Rian Kurniawan, A.Md., Evi Ratna Sari, S.K.M, Radi Riadi, S.Farm., Apt., Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc., Laila Udhhiyyah, SE, Setyaningsih, SE,	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi

				Romanudin Nanang Mulyanto, S.E	
82	Training for Trainer	Daring	31 Januari 2023	Sri Astuti, S.Si., M.Si.	Pelatihan Teknis
83	TRAINING PLANNING DAN BUDGETING MELALUI KERJASAMA DENGAN CENTER FOR CONTINUING EDUCATION (CCE)	University Of Sydney	21 Oktober 2023	Romanudin Nanang Mulyanto, S.E	Pelatihan Teknis
84	Webinar Optimalisasi BMN Melalui Pemanfaatan BMN serta Tata Cara Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	Daring : Online Zoom Meeting	05 Desember 2023	Rian Kurniawan, A.Md.	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
85	Webinar Tugas dan Tanggung Jawab Analis Pengelolaan Keuangan APBN sebagai PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran	Daring : Online Zoom Meeting	07 November 2023	Laila Udhhiyyah, SE	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
86	Webinar/Seminar Potensi Cemaran pada Produk Farmasi dan Strategi Pengawasannya		04 Mei 2023	Rotua Uli Carolina Simanjuntak, S.K.M	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
87	Webinar/Seminar/Sosialisasi Vaksin Covid-19		22 September 2023	Radi Riadi, S.Farm., Apt.	Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Konferensi
88	Workshop / Bimtek Perencanaan Pengembangan Kompetensi 2025 dan money	jakarta	01 November 2023	Setyaningsih, SE,	Bimbingan Teknis / Penataran
89	Workshop Bridging Competency - Publikasi Kajian Kebijakan	Aston Priority Simatupang Hotel and	03 Maret 2023	Isna Inawati Asih, S. Farm, Apt, Eka Pratiwi, S.Si, Apt, Grace Silvia	Workshop / Loka Karya

		Conference Center		Lumantow, S.Farm, Apt, Dr. Rina Adriany, Apt, MSi, Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Fairuz Murti, S.K.M, Okki Ayu Oktria, S.Hub.Int, Septia Chandra Kesi, S.Farm, Evi Ratna Sari, S.K.M, Fajri Nugroho, S.Farm, Apt, Ellen Simanjuntak, SE, Yosua Halasan P Panjaitan, S.Farm, Radi Riadi, S.Farm., Apt., Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc., Rina Puspitasari, STP, M.Sc, Setyaningsih, SE	
90	Workshop Cyber Security: Threat intelligence and Challenges (Threat Hunting)	hybrid (Daring dan Luring) Savero Hotel - Depok	23 Juni 2023	Rian Kurniawan, A.Md.	Workshop / Loka Karya
91	Workshop Implementasi SPBE dan Kearsipan	Yogyakarta	10 Mei 2023	Dyah Larasinta, A.Md	Workshop / Loka Karya
92	Workshop Informasi dan Komunikasi	Harris Hotel and Conventions Bekasi	05 Juli 2023	Dwi Ratnasari, S.Si,	Workshop / Loka Karya

93	Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat	Hotel Shangri La Surabaya	20 Juni 2023	Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek, Rotua Uli Carolina Simanjuntak, S.K.M	Workshop / Loka Karya
94	Workshop Pemantapan Pelaksanaan Manajemen Risiko		16 Januari 2023	Kenya Lintang Wienantu, S.K.M	Workshop / Loka Karya
95	Workshop Penatalaksanaan BMN	Hotel Grand Mercure, Bandung	21 Juni 2023	Setyaningsih, SE	Workshop / Loka Karya
96	Workshop Pengadaan Barang/ Jasa	Hotel Holiday Inn Jakarta	13 Maret 2023	Dyah Larasinta, A.Md, Ellen Simanjuntak, SE	Workshop / Loka Karya
97	Workshop Peningkatan Pelayanan Publik (Pelayanan Prima)	Jakarta	12 September 2023	Eva Nikastri, STP, M.Si, Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek	Workshop / Loka Karya
98	Workshop Regulatory Impact Assessment	Grand Savero Hotel, Bogor	14 Agustus 2023	Yosua Halasan P Panjaitan, S.Farm	Workshop / Loka Karya
99	Workshop terkait Strategis Kebijakan Pimpinan	Hotel Santika Mega City Bekasi	24 Februari 2023	Isna Inawati Asih, S. Farm, Apt, Eva Nikastri, STP, M.Si, Eka Pratiwi, S.Si, Apt, Grace Silvia Lumantow, S.Farm, Apt, Sri Astuti, S.Si., M.Si., Adinda, S.T, Dodo Saputra, S.Kom, Dr. Rina Adriany, Apt, MSi, Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Rian Kurniawan, A.Md., Renny Anggraeni,	Workshop / Loka Karya


				<p>A.Md, Dyah Larasinta, A.Md, Fairuz Murti, S.K.M, Okki Ayu Oktria, S.Hub.Int, Sri Nurhayati, S.Si,Apt., M.M, Septia Chandra Kesi, S.Farm, Fajri Nugroho, S.Farm, Apt, Ellen Simanjuntak, SE, Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek, Dwi Ratnasari, S.Si, Tina Wikara, S.Si, M.Farm, Yosua Halasan P Panjaitan, S.Farm, Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si, Radi Riadi, S.Farm., Apt., Rotua Uli Carolina Simanjuntak, S.K.M, Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc., Rina Puspitasari, STP, M.Sc, Laila Udhhiyyah, SE, Setyaningsih, SE, Romanudin Nanang Muliyanto, S.E</p>	
100	Worshop Penulisan Karya Ilmiah	Hotel Avenzel Bekasi	16 Agustus 2023	<p>Eka Pratiwi, S.Si, Apt, Sri Astuti, S.Si., M.Si., Leni Ranty, S.Farm, Apt, Dr. Rina</p>	Workshop / Loka Karya



		Adriany, Apt, MSi, Dr. Irhamahayati, S.Si, Apt, MTI, Rian Kurniawan, A.Md., Renny Anggraeni, A.Md, Dyah Larasinta, A.Md, Fairuz Murti, S.K.M, Evi Ratna Sari, S.K.M, Fajri Nugroho, S.Farm, Apt, Ellen Simanjuntak, SE, Novi Pusparini, S.Farm, Apt.,M.Biotek, Dwi Ratnasari, S.Si, Dra. Lince Yarni, Apt, M.Si, Radi Riadi, S.Farm., Apt., Kenya Lintang Wienantu, S.K.M, Rina Puspitasari, STP, M.Sc, Laila Udhhiyyah, SE, Setyaningsih, SE, Romanudin Nanang Mulyanto, S.E	
--	--	---	--

Lampiran 2. Rencana Pengembangan Kompetensi tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

No	Tema Peningkatan Kompetensi	Jenis Kompetensi	Tahun		
			2023	2024	2025
1	<i>Conceptual and Analytical Thinking</i>	Manajerial	v	v	v
2	Kompetensi Manajerial	Manajerial	v	v	v
3	Manajemen Perubahan	Manajerial	v		v
4	Pelayanan Publik	Manajerial	v	v	
5	Pengembangan Diri	Manajerial	v	v	v
6	Perekat Bangsa dan Integritas	Manajerial	v	v	v
7	<i>Problem Solving and Decision Making</i>	Manajerial	v	v	v
8	<i>Team Building</i>	Manajerial	v	v	v
9	Penilaian Kinerja JF Arsiparis	Teknis Pendukung			
10	Penyusunan LAKIP	Teknis Pendukung	v	v	v
11	Penyusunan Rencana Strategis (Analisis Lingkungan Strategis, Perumusan KPI, Target Indikator, <i>Measurement</i>)	Teknis Pendukung	v	v	
12	Monitoring dan Evaluasi Program	Teknis Pendukung	v	v	
13	Pelaporan Keuangan	Teknis Pendukung	v	v	
14	Pengelolaan Arsip	Teknis Pendukung	v		
15	Pengelolaan Arsip Keuangan	Teknis Pendukung			
16	Pengelolaan Kepegawaian (Regulasi terbaru)	Teknis Pendukung	v	v	v



No	Tema Peningkatan Kompetensi	Jenis Kompetensi	Tahun		
			2023	2024	2025
17	Pengelolaan Keuangan (Konsep, Aplikasi)	Teknis Pendukung	v	v	v
18	Analisis Kebijakan Publik	Teknis RK	v	v	v
19	Komunikasi Hasil Riset	Teknis RK	v	v	v
20	Manajemen Data	Teknis RK	v	v	v
21	Metode/Tools Analisis/Pengolahan Data	Teknis RK	v	v	v
22	Metodologi Penelitian	Teknis RK	v	v	v
23	Penulisan Ilmiah/Publikasi	Teknis RK	v	v	v
24	Penyusunan Regulasi/Kebijakan Publik	Teknis RK	v	v	v
25	Proses Bisnis BPOM	Teknis RK	v	v	
26	Tatakelola Teknologi Informasi (Jaringan, Keamanan Data, <i>Database Management</i>)	Teknis RK	v	v	v
27	Teknik Advokasi Kebijakan	Teknis RK	v	v	v
28	Kajian Risiko	Teknis RK		v	v
29	Desain Grafis dan Visualisasi Data	Teknis RK / Pendukung	v	v	v
30	Penyusunan Anggaran	Teknis RK / Pendukung	v	v	
31	<i>Project Management</i>	Teknis RK / Pendukung	v	v	v
32	Pengelolaan Media Informasi (Website, IG, Medsos)	Teknis RK / Pendukung	v	v	v

Lampiran 3. Tabel Publikasi Hasil Kajian Riset Obat dan Makanan Tahun 2023

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
1	Evaluation of 2D Barcode Implementation In Drug and Food Control Program	Internasional	AUA Academic Conference on Public Health in The Covid-19 Pandemic, FKM UI	Sri Astuti, Tina Wikara, Lince Yarni, Sri Nurhayati, Rotua Uli Carolina, Evi Ratna Sari
2	Pengembangan Konsep Ekosistem Pendampingan dalam Mendukung Usaha Kecil Obat Tradisional (UMK-OT)	Nasional	Policy Confrence on 2nd AAKI MUNAS and Conference 2023	Khusnul Khotimah, Irhama Hayati dan Hayatun Nufus
3	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Mendukung Usaha Mikro Kecil Obat Tradisional (UMK-OT) Menggunakan System Dynamics	Internal	Forum Diseminasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023	Khusnul Khotimah, S.Si., M.Sc. dan Tim
4	Ekosistem Pendampingan Usaha Mikro Kecil (UMK) Obat Tradisional (OT) Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Usaha dan Daya Saing Produk	Nasional	Open House - Expo Sistem Pengawasan Produk Life Cycle Obat dan Makanan, Tanggal 12-13 Januari 2023	Khusnul Khotimah, Irhama Hayati, Mahawan Primbar Priyaka
5	Diseminasi Hasil Evaluasi Penerapan 2D Barcode dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan	Internal	1. Rapat Sosialisasi Hasil Evaluasi Penerapan 2D Barcode dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan	Sri Astuti

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
			2. Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan 3. Nota Dinas Laporan Hasil Kajian	
10	PENGUKURAN INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	Nasional	Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PI.06.2.14.01.23.04 Perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	Tina Wikara, Sri A, Rotua Uli C, Nendy S, Rianita P, Ulin Nuha
11	Kajian Cemaran Timbal (Pb) dan Studi Kelayakan Industri MP-ASI Terhadap Rekomendasi Batas Maksimal Pb oleh Codex	Nasional	Focus Group Discussion Kajian Risiko Timbal (Pb) pada MP-ASI dan Studi Kelayakan Industri	Eva Nikastrri

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
12	Kajian Cemaran Timbal (Pb) dan Studi Kelayakan Industri Gula Terhadap Rekomendasi Batas Maksimal Pb oleh Codex	Nasional	Focus Group Discussion Kajian Risiko Timbal (Pb) pada Gula dan Garam Serta Studi Kelayakan Industri Pangan	Eva Nikastri
13	Kajian Cemaran Timbal (Pb) dan Studi Kelayakan Industri Garam Terhadap Rekomendasi Batas Maksimal Pb oleh Codex	Nasional	Focus Group Discussion Kajian Risiko Timbal (Pb) pada Gula dan Garam Serta Studi Kelayakan Industri Pangan	Eva Nikastri
14	Kajian Mikroplastik pada Air Baku dan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia	Internal	Rapat Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC	Eva Nikastri
15	Analisis Senyawa Karsinogenik pada Produk Pangan Olahan dan Kemasan Pangan	Nasional	Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat '	Eva Nikastri, Novi Pusparini, Famila, Ilaine Audia, Ninda
16	Paparan Nitrat dan Nitrit pada Beberapa Produk Pangan dan Risiko terhadap Kesehatan	Nasional	Forum Diseminasi Hasil Analisis Kajian Obat dan Makanan	Eva Nikastri, Novi Pusparini, Ilaine Audia, Famila dan Ninda
17	Mengenal Potensi Cemaran Mikroplastik di Air untuk Produksi Obat dan Makanan	Nasional	Lomba Karya Tulis Populer BPOM	Eva Nikastri, Novi Pusparini dan Ninda Nur Amaliya

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
18	Kajian Risiko Bahan Tambahan Pangan Nitrat Nitrit pada Pangan Olahan	Nasional	Surat penyampaian hasil kajian ke Badan Pangan Nasional	Panel Pakar dan Sekretariat INARAC
19	Kajian Risiko Arsen Total dan Arsen Anorganik pada Beras dan Produk Olahan	Nasional	Surat Penyampaian Hasil Kajian Risiko INARAC ke Badan Pangan Nasional (BAPANAS)	Panel Pakar dan Sekretariat INARAC
20	KAJIAN CEMARAN MIKROPLASTIK PADA AIR BAKU, AIR MINUM DAN AIR UNTUK PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA	Internal	Nota Dinas ke Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Eva Nikastri, Novi Pusparini, Ilaine Audia, Julian, Ninda
21	Kajian Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2022	Internal	SIR PUSAKOM	Dra. Lince Yarni, Apt., M. Si
22	Kajian Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2023	Internal	SIR PUSAKOM	Lince Yarni, Sri Nurhayati, Rotua Uli Carolina Simanjuntak, Ayu Prihatin Dian Lestari, Mazidah Imanuna, Nafa Rizta Anggarini
23	KAJIAN ANALISIS DATA KASUS KERACUNAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	Internal	SIR PUSAKOM	Dra. Sri Murhandini, Apt., M.Phil, Dra. Lince Yarni, Apt., M. Si, Sri

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
				Nurhayati, S. Si, Apt, Rotua Uli Carolina Simanjuntak, S.K.M, Ayu Prihatin Dian Lestari, S.KM, Mazidah Imanuna, S.K.M, Nafa Rizta Anggarini, S. Stat.
24	KAJIAN PENGUKURAN INDEKS KEPATUHAN (COMPLIANCE INDEX) PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	Internal	Sosialisasi Hasil via zoom	Sri Murhandini, Lince Yarni, Sri Astuti, Evi Ratna Sari, Ayu Prihatin Dian Lestari, Nafa Rizta Anggarini
30	Kajian Survei Profil Obat Beredar	Balai POM di Kendari	SIR PUSAKOM	Tim Kajian
40	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	Inspektorat II BPOM	SIR PUSAKOM	Tim Kajian
41	Kajian Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022	Inspektorat II BPOM	SIR PUSAKOM	Tim Kajian
42	Survei Profil Produk Obat dan Makanan Beredar Tahun 2022	Direktorat Pengawasan	SIR PUSAKOM	Tim Kajian

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
		Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif		
44	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	Pusdatin BPOM	SIR PUSAKOM	Tim Kajian
45	Survei Profil Produk Obat dan Makanan Beredar Tahun 2022	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan	SIR PUSAKOM	Tim Kajian

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
		Suplemen Kesehatan		
46	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	BBPOM di Palangka Raya	SIR PUSAKOM	Tim Kajian
10	PENGUKURAN INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	Nasional	Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PI.06.2.14.01.23.04 Perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	Tina Wikara, Sri A, Rotua Uli C, Nendy S, Rianita P, Ulin Nuha

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
11	Kajian Cemaran Timbal (Pb) dan Studi Kelayakan Industri MP-ASI Terhadap Rekomendasi Batas Maksimal Pb oleh Codex	Nasional	Focus Group Discussion Kajian Risiko Timbal (Pb) pada MP-ASI dan Studi Kelayakan Industri	Eva Nikastri
12	Kajian Cemaran Timbal (Pb) dan Studi Kelayakan Industri Gula Terhadap Rekomendasi Batas Maksimal Pb oleh Codex	Nasional	Focus Group Discussion Kajian Risiko Timbal (Pb) pada Gula dan Garam Serta Studi Kelayakan Industri Pangan	Eva Nikastri
13	Kajian Cemaran Timbal (Pb) dan Studi Kelayakan Industri Garam Terhadap Rekomendasi Batas Maksimal Pb oleh Codex	Nasional	Focus Group Discussion Kajian Risiko Timbal (Pb) pada Gula dan Garam Serta Studi Kelayakan Industri Pangan	Eva Nikastri
14	Kajian Mikroplastik pada Air Baku dan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia	Internal	Rapat Analisis Risiko Keamanan Pangan INARAC	Eva Nikastri
15	Analisis Senyawa Karsinogenik pada Produk Pangan Olahan dan Kemasan Pangan	Nasional	Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat '	Eva Nikastri, Novi Pusparini, Famila, Ilaine Audia, Ninda

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
16	Paparan Nitrat dan Nitrit pada Beberapa Produk Pangan dan Risiko terhadap Kesehatan	Nasional	Forum Diseminasi Hasil Analisis Kajian Obat dan Makanan	Eva Nikastri, Novi Pusparini, Ilaine Audia, Famila dan Ninda
17	Mengenal Potensi Cemaran Mikroplastik di Air untuk Produksi Obat dan Makanan	Nasional	Lomba Karya Tulis Populer BPOM	Eva Nikastri, Novi Pusparini dan Ninda Nur Amaliya
18	Kajian Risiko Bahan Tambahan Pangan Nitrat Nitrit pada Pangan Olahan	Nasional	Surat penyampaian hasil kajian ke Badan Pangan Nasional	Panel Pakar dan Sekretariat INARAC
19	Kajian Risiko Arsen Total dan Arsen Anorganik pada Beras dan Produk Olahan	Nasional	Surat Penyampaian Hasil Kajian Risiko INARAC ke Badan Pangan Nasional (BAPANAS)	Panel Pakar dan Sekretariat INARAC
20	KAJIAN CEMARAN MIKROPLASTIK PADA AIR BAKU, AIR MINUM DAN AIR UNTUK PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA	Internal	Nota Dinas ke Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Eva Nikastri, Novi Pusparini, Ilaine Audia, Julian, Ninda
21	Kajian Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2022	Internal	SIR PUSAKOM	Dra. Lince Yarni, Apt., M. Si
22	Kajian Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2023	Internal	SIR PUSAKOM	Lince Yarni, Sri Nurhayati, Rotua Uli Carolina Simanjuntak, Ayu

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
				Prihatin Dian Lestari, Mazidah Imanuna, Nafa Rizta Anggarini
23	KAJIAN ANALISIS DATA KASUS KERACUNAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	Internal	SIR PUSAKOM	Dra. Sri Murhandini, Apt., M.Phil, Dra. Lince Yarni, Apt., M. Si, Sri Nurhayati, S. Si, Apt, Rotua Uli Carolina Simanjuntak, S.K.M, Ayu Prihatin Dian Lestari, S.KM, Mazidah Imanuna, S.K.M, Nafa Rizta Anggarini, S. Stat.
24	KAJIAN PENGUKURAN INDEKS KEPATUHAN (COMPLIANCE INDEX) PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	Internal	Sosialisasi Hasil via zoom	Sri Murhandini, Lince Yarni, Sri Astuti, Evi Ratna Sari, Ayu Prihatin Dian Lestari, Nafa Rizta Anggarini
30	Kajian Survei Profil Obat Beredar	Balai POM di Kendari	SIR PUSAKOM	Tim Kajian
40	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022	Inspektorat II BPOM	SIR PUSAKOM	Tim Kajian

No	Judul Publikasi	Lingkup Publikasi	Forum Publikasi/ Media Publikasi	Authors
41	Kajian Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022	Inspektorat II BPOM	SIR PUSAKOM	Tim Kajian
42	Survei Profil Produk Obat dan Makanan Beredar Tahun 2022	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	SIR PUSAKOM	Tim Kajian